



Katalog BPS: 1201005

Rencana Strategis Badan Pusat Statistik

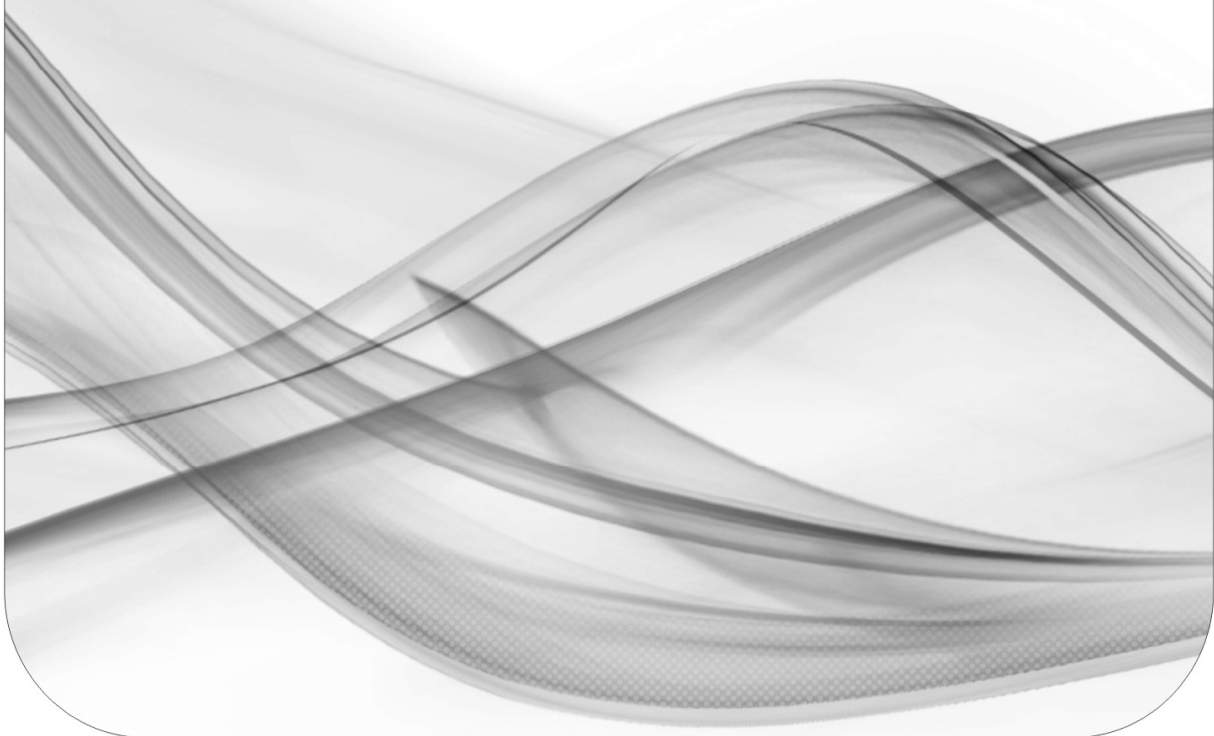
2010-2014



BADAN PUSAT STATISTIK

**Rencana Strategis
Badan Pusat Statistik**

2010-2014



RENCANA STRATEGIS BADAN PUSAT STATISTIK 2010-2014

ISBN.978-979-064-145-7

No. Publikasi : 02110.1003

Katalog BPS : 1201005

Ukuran Buku : 17 cm x 24 cm

Jumlah Halaman : 80 halaman

Naskah :

Bagian Penyusunan Rencana

Gambar Kulit :

Subdirektorat Publikasi Statistik

Diterbitkan oleh :

Badan Pusat Statistik - Indonesia

Dicetak oleh :

CV. Nario Sari

Boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya



BADAN PUSAT STATISTIK

PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK NOMOR 19 TAHUN 2010

TENTANG

RENCANA STRATEGIS BADAN PUSAT STATISTIK TAHUN 2010-2014

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

Menimbang : bahwa untuk memenuhi kebutuhan data statistik yang berkualitas, lengkap, akurat, relevan, mutakhir, dan berkesinambungan sebagai acuan dasar dalam perencanaan pembangunan nasional, maka Badan Pusat Statistik perlu menyusun perencanaan strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pokok pembangunan dalam lima tahun ke depan melalui Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
7. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 121 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPS di Daerah;
8. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN PUSAT STATISTIK TAHUN 2010-2014.

Pasal 1

Rencana Strategis pada Badan Pusat Statistik Tahun 2010-2014 yang selanjutnya dalam Peraturan ini disebut sebagai Renstra BPS Tahun 2010-2014, memuat gambaran umum situasi perstatistikan nasional, visi, misi, tujuan, strategi, dan arah kebijakan pembangunan statistik, serta program dan kegiatan Badan Pusat Statistik.

Pasal 2

- (1) Renstra BPS Tahun 2010-2014 disusun untuk mendukung pencapaian tujuan dan target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014 bidang statistik dan digunakan sebagai landasan dan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah bidang statistik selama kurun waktu 2010-2014.

- (2) Renstra BPS Tahun 2010-2014 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai pedoman bagi instansi vertikal BPS dalam menyusun Renstra pada masing-masing instansi vertikal BPS tersebut.
- (3) Penyusunan Renstra pada instansi vertikal BPS Tahun 2010-2014 harus memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Pasal 3

Renstra BPS Tahun 2010-2014 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 1 Februari 2010

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,



Dr. RUSMAN HERIAWAN
NIP. 19511104 197403 1 001

SINGKATAN DAN AKRONIM

ADHB	Atas Dasar Harga Berlaku
ADHK	Atas Dasar Harga Konstan
ASEAN	Association of Southeast Asian Nations
AusAid	The Australian Agency for International Development
BLT	Bantuan Langsung Tunai
BPA	Business Process Analysis
BPK	Badan Pemeriksa Keuangan
BPR	Business Process Reengineering
BPS	Badan Pusat Statistik
BRS	Berita Resmi Statistik
DIPA	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
EPPD	Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
EuroStat	Statistical Office of the European Communities
HPB	Harga Perdagangan Besar
IHK	Indeks Harga Konsumen
IKK	Indeks Kemahalan Konstruksi
JICA	Japan International Cooperation Agency
KPBC	Kantor Pelayanan Bea dan Cukai
KSK	Koordinator Statistik Kecamatan
SAKIP	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
LAKIP	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
LHKPN	Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara
MDG's	Millennium Development Goals
MFSM	Monetary and Financial Statistics Manual
NAD	Neraca Arus Dana
NSO	National Statistical Offices
NSPK	Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria
NTP	Nilai Tukar Petani
PBB	Perserikatan Bangsa-bangsa
PDB	Produk Domestik Bruto
PDRB	Produk Domestik Regional Bruto
Perpres	Peraturan Presiden
PKH	Program Keluarga Harapan
Podes	Potensi Desa
PP	Peraturan Pemerintah
Program P2A2N	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Negara
Program P2IS	Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik
Program PSPA	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pusdiklat	Pusat Pendidikan dan Pelatihan
Renstra	Rencana Strategis
RPJM	Rencana Pembangunan Jangka Menengah
SAK	Sistem Akuntabilitas Kinerja
SAKERNAS	Survei Angkatan Kerja Nasional
SAKIP	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
SBH	Survei Biaya Hidup
SDM	Sumber Daya Manusia
Si Rusa	Sistem Rujukan Statistik
SNA	System of National Account
SNSE	Sistem Neraca Sosial Ekonomi
SSN	Sistem Statistik Nasional
Statcap CERDAS	Statistical Capacity Building – Change and Reform for Development of Statistics in Indonesia
STIS	Sekolah Tinggi Ilmu Statistik
SUSENAS	Survei Sosial-Ekonomi Nasional
TIK	Teknologi Informasi dan Komunikasi
UNDP	United Nation Development Program
UNFPA	United Nation Population Fund
UNICEF	United Nation Children's Fund
UNSD	United Nations Statistical Division
USAid	United State Agency for International Development
UU	Undang-Undang
WDP	Wajar Dengan Pengecualian
WTP	Wajar Tanpa Pengecualian

KATA PENGANTAR

Perencanaan yang baik merupakan pijakan awal untuk menentukan arah kebijakan yang strategis melalui penetapan program dan kegiatan yang tepat. Salah satu kunci keberhasilan perencanaan adalah tersedianya data dan statistik yang andal dan terpercaya. Data dan statistik yang berkualitas merupakan rujukan bagi semua pihak dalam memformulasikan kebijakan, melakukan pemantauan/*monitoring*, dan mengevaluasi program agar sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien.

Rencana Strategis Badan Pusat Statistik (Renstra BPS) Tahun 2010-2014 merupakan rencana pembangunan di bidang statistik selama lima tahun ke depan yang disusun dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis, terutama yang menyangkut potensi, peluang, tantangan, dan permasalahan BPS. Renstra dirumuskan untuk menjadi pedoman dan arahan bagi seluruh jajaran BPS dan para pemangku kepentingan dalam upaya mencapai sasaran-sasaran pembangunan statistik yang telah ditetapkan.

Atas segala masukan dan sumbangan pemikiran semua pihak yang telah berpartisipasi mewujudkan Renstra BPS Tahun 2010-2014 disampaikan penghargaan dan terima kasih. Semoga dokumen perencanaan ini bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan untuk perkuatan Sistem Statistik Nasional.

Jakarta, Februari 2010
Kepala Badan Pusat Statistik,



Dr. Rusman Heriawan

RINGKASAN EKSEKUTIF



mempunyai tugas menyediakan data dan informasi statistik yang berkualitas: lengkap, akurat, mutakhir, berkelanjutan, dan relevan bagi pengguna data. Data dan informasi statistik yang berkualitas merupakan rujukan bagi upaya perumusan kebijakan dalam menyusun perencanaan, melakukan pemantauan dan mengevaluasi program-program agar sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan tepat, sehingga tujuan pembangunan, diantaranya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, dapat dicapai dengan efektif.

Peraturan Presiden No. 5 tahun 2010 mengatur kewajiban Kementerian/Lembaga untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) 2010-2014 yang memuat visi dan misi Kementerian/Lembaga yang telah diselaraskan dengan visi dan misi RPJMN 2010-2014. Rencana Strategis Badan Pusat Statistik (Renstra BPS) Tahun 2010-2014 disusun berlandaskan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan RPJM Nasional Tahun 2010-2014, serta memperhatikan masukan dari para pemangku kepentingan (*stakeholders*). Renstra BPS Tahun 2010-2014 menjadi acuan bagi seluruh jajaran BPS dan para pemangku kepentingan, khususnya penyelenggara kegiatan statistik dalam melaksanakan pembangunan nasional di bidang statistik selama lima tahun ke depan. Renstra juga sebagai dasar bagi BPS dalam melaksanakan kewajiban sebagai penyedia data dan informasi statistik.

Dengan memperhatikan berbagai kekuatan dan kelemahan internal serta peluang dan tantangan yang dihadapi dari pihak luar dengan landasan pemikiran proaktif, maka Visi BPS 2010-2014 adalah “Pelopor data statistik terpercaya untuk semua (*The Agent of trustworthy*

statistical data for all)". Pembangunan nasional di bidang statistik diarahkan agar mampu mengakomodasi berbagai tantangan yang berkembang, seperti reformasi yang mendukung keterbukaan informasi, otonomi daerah yang mengandung tantangan keragaman data dan informasi statistik pada tingkatan wilayah kecil, perkembangan teknologi informasi yang mengarah kepada peningkatan kemudahan akses masyarakat akan data dan informasi, serta memperhatikan kesiapan SDM penyelenggara statistik dan kecenderungan pembatasan akses terhadap data dari responden/obyek kegiatan statistik.

Berdasarkan visi BPS, maka misi pembangunan nasional statistik Indonesia mencakup: 1). Memperkuat landasan konstitusional dan operasional lembaga statistik untuk penyelenggaraan statistik yang efektif dan efisien; 2). Menciptakan insan statistik yang kompeten dan profesional, didukung pemanfaatan teknologi informasi mutakhir untuk kemajuan perstatistikan Indonesia; 3). Meningkatkan penerapan standar klasifikasi, konsep dan definisi, pengukuran, dan kode etik statistik yang bersifat universal dalam setiap penyelenggaraan statistik; 4). Meningkatkan kualitas pelayanan informasi statistik bagi semua pihak; dan 5). Meningkatkan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi kegiatan statistik yang diselenggarakan pemerintah dan swasta, dalam kerangka Sistem Statistik Nasional (SSN) yang efektif dan efisien.

Sasaran strategis pembangunan statistik nasional Indonesia dirumuskan sebagai berikut: 1). Tersedianya data dan informasi statistik yang lengkap, akurat, dan tepat waktu di seluruh bidang pembangunan serta meningkatkan pelayanan bagi pengguna data dan informasi statistik; 2). Terwujudnya struktur organisasi BPS secara efektif dan efisien dalam kerangka mewujudkan good governance serta meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS; 3). Meningkatnya kapasitas SDM dalam pengetahuan, penguasaan ilmu, metoda statistik, dan teknologi informasi mutakhir guna menyempurnakan metoda

pengumpulan, pengolahan dan diseminasi statistik; 4). Meningkatnya kerjasama antar lembaga statistik/penelitian dalam negeri maupun internasional atas dasar saling menghormati kemandirian dan menguntungkan dalam rangka menghasilkan data dan informasi statistik berkualitas internasional; 5). Terwujudnya SSN dalam menunjang kelancaran tugas dan fungsi lembaga-lembaga statistik yang ada baik di instansi pemerintah, swasta maupun masyarakat; dan 6). Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana fisik.

Adapun tujuan utama dalam pembangunan nasional di bidang statistik lima tahun ke depan adalah meningkatkan ketersediaan data dan informasi statistik yang berkualitas serta pelayanan prima dalam rangka mewujudkan SSN yang andal, efektif, dan efisien. Untuk itu, BPS perlu meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait, integrasi, sinkronisasi, dan standardisasi kegiatan statistik.

Berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan, maka BPS menetapkan strategi yang meliputi: a) Strategi Bidang Peningkatan Kualitas dan Keragaman Data; b) Strategi Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK); c) Strategi Bidang Peningkatan Kapasitas dan Kemampuan SDM serta Penataan Kelembagaan.

Sebagai Lembaga Pemerintah Non-Kementrian, BPS mempunyai satu Program Teknis dan tiga Program Generik. Program Teknis BPS adalah Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (P2IS). Adapun Program Generik BPS meliputi: (i) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Kegiatan Teknis Lainnya BPS, (ii) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (PSPA) BPS, (iii) Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Negara (P2A2N) BPS.

Mengingat pentingnya peranan data dan informasi statistik dalam proses perencanaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan nasional maupun bagi masyarakat, maka BPS menentukan strategi-strategi perkuatan data dan informasi statistik yang dilakukan dengan menata ulang kelembagaan dalam kerangka pencapaian good governance dan clean government. Reformasi birokrasi ditujukan untuk meningkatkan kualitas data, dengan membangun pilar-pilar pendukung yang meliputi pembangunan arsitektur dan peningkatan sarana dan prasarana pendukung TIK, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM. Komitmen ini dirumuskan sebagai antisipasi menghadapi tantangan global maupun regional pada periode lima tahun ke depan.

DAFTAR ISI

	Halaman
KINGKATAN DAN AKRONIM	i
KATA PENGANTAR	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF	v
DAFTAR ISI	ix
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Kondisi Umum	3
C. Potensi dan Permasalahan	5
BAB II. VISI, MISI, DAN TUJUAN BPS	11
A. Visi BPS	11
B. Misi BPS	12
C. Tujuan	14
D. Sasaran Strategis BPS	15
BAB III. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	17
A. Strategi dan Arah Kebijakan Nasional	17
B. Strategi dan Arah Kebijakan BPS	18
C. Program dan Kegiatan	34
BAB IV. PENUTUP	43
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Indikator Kinerja Utama, Kegiatan Prioritas 2010-2014	37
Tabel 2. Alokasi Anggaran 2010-2014 Menurut Program	42

LAMPIRAN

Lampiran 1. Target Pembangunan untuk tahun 2010-2014	
Badan Pusat Statistik	47
Lampiran 2. Kebutuhan Pendanaan Pembangunan Tahun 2010-2014	
Badan Pusat Statistik	64
Sistem Statistik Nasional	67

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Badan Pusat Statistik (BPS) mempunyai tugas menyediakan data dan informasi statistik yang berkualitas: lengkap, akurat, mutakhir, berkelanjutan, dan relevan bagi pengguna data. Data dan informasi statistik yang berkualitas merupakan rujukan bagi upaya perumusan kebijakan dalam menyusun perencanaan, melakukan pemantauan dan mengevaluasi program-program agar sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan tepat, sehingga tujuan pembangunan, diantaranya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, dapat dicapai dengan efektif.

Dalam Peraturan Presiden No. 5 tahun 2010 ditetapkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2010-2014 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden hasil Pemilihan Umum Tahun 2009. Dengan demikian, Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2010-2014 yang disusun Kementerian/Lembaga harus mengacu kepada RPJM Nasional 2010-2014. Perpres No 5 Tahun 2010 juga mengatur kewajiban Kementerian/Lembaga untuk menyusun Rencana Strategis 2010-2014 dengan menyusun visi dan misi Kementerian/Lembaga yang diselaraskan dengan visi dan misi RPJMN 2010-2014. Dengan adanya Renstra sebagai dasar menyusun rencana kerja tahunan Kementerian/Lembaga

maka pelaksanaan program dan kegiatan akan menjadi lebih terarah, efektif, dan efisien.

Rencana Strategis Badan Pusat Statistik (Renstra BPS) Tahun 2010-2014 disusun berlandaskan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan RPJM Nasional Tahun 2010-2014, serta memperhatikan masukan dari para pemangku kepentingan (*stakeholders*). Sesuai Peraturan Presiden No. 5 tahun 2010, Renstra BPS Tahun 2010-2014 merupakan dokumen perencanaan pembangunan nasional di bidang statistik untuk kurun waktu 2010-2014. Renstra BPS Tahun 2010-2014 menjadi acuan umum bagi seluruh jajaran BPS dan para pemangku kepentingan, khususnya penyelenggara kegiatan statistik dalam melaksanakan pembangunan nasional di bidang statistik selama lima tahun ke depan. Renstra juga sebagai dasar bagi BPS dalam melaksanakan kewajiban sebagai penyedia data dan informasi statistik. Untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Renstra perlu dijabarkan secara lebih rinci ke dalam dokumen rencana tahunan melalui Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L).

Ketersediaan data dan informasi statistik yang beragam, tepat waktu, dan makin cepat disajikan merupakan tuntutan permintaan masyarakat dewasa ini. Hal ini merupakan tantangan bagi BPS dan para penyelenggara kegiatan statistik untuk selalu meningkatkan mutu penyediaan data dan informasi statistik sekaligus mutu pelayanannya. Untuk itu, BPS menetapkan visi, misi, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pokok pembangunan di bidang statistik yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) BPS 2010-2014.

B. Kondisi Umum

Sejalan dengan penerapan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, langkah penguatan pemantauan dan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan menjadi pilihan strategis. Proses perencanaan memerlukan data dan informasi statistik yang berkualitas. Oleh karena itu, ketersediaan data dan informasi statistik yang andal merupakan salah satu kunci keberhasilan perencanaan. Data dan informasi statistik berkualitas tidak saja menjadi rujukan pemerintah tetapi juga dibutuhkan oleh kalangan swasta dan masyarakat untuk pengembangan usaha dan beragam kebutuhan lainnya.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan data dan informasi statistik dan amanat UU No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik, BPS telah menerbitkan Surat Keputusan Kepala BPS Nomor 5 Tahun 2000 tentang Sistem Statistik Nasional (SSN). Tujuan diterbitkannya SK Kepala BPS tersebut antara lain:

- (a) agar para penyelenggara kegiatan statistik memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal;
- (b) menghindari kemungkinan terjadinya duplikasi kegiatan oleh para penyelenggara statistik; dan
- (c) agar tercipta suatu Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif, dan efisien.

Salah satu upaya BPS untuk mewujudkan SSN antara lain melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah dan masyarakat, baik di pusat maupun daerah, serta dengan lembaga-lembaga internasional. Koordinasi dan kerjasama dimaksud dilaksanakan atas dasar kemitraan dengan tetap mengantisipasi serta

menerapkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Jejaring tersebut merupakan kekuatan yang terus dikembangkan dalam rangka pembangunan nasional di bidang statistik.

Masyarakat menuntut ketersediaan data dan informasi statistik yang beragam, rinci, mudah dipahami, dan tepat waktu. Tuntutan kebutuhan data dan informasi statistik tersebut belum sepenuhnya terpenuhi, namun secara bertahap terus diupayakan ketersediaannya. Dalam lima tahun ke depan akan dilaksanakan Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik untuk penguatan sistem data dan informasi pembangunan nasional yang sejalan dengan RPJM Nasional Tahun 2010-2014, seperti dituangkan dalam Buku II RPJM Nasional Tahun 2010-2014, BAB XI. Penguatan sistem data dan informasi pembangunan memiliki peran strategis untuk mendukung pencapaian keberhasilan pembangunan nasional.

Upaya pengembangan yang dilakukan BPS sampai dengan tahun 2009 telah menghasilkan beragam data dan indikator sosial-ekonomi. Indikator sosial-ekonomi dihasilkan melalui Sensus Penduduk, Sensus Pertanian, Sensus Ekonomi, dan berbagai survei di bidang sosial-ekonomi dan kependudukan. Semua indikator sosial-ekonomi tersebut telah dapat dihasilkan secara reguler maupun dalam waktu tertentu.

BPS juga memenuhi kebutuhan pemerintah yang tidak diagendakan sebelumnya, diantaranya Pendataan Sosial Ekonomi 2005, Pendataan Program Perlindungan Sosial 2008, dan Pendataan Usaha Tani 2009 untuk mendukung program-program khusus, seperti Program Bantuan

Langsung Tunai (BLT), Program Keluarga Harapan (PKH), dan sejenisnya.

BPS menyampaikan hasil kegiatan statistik kepada masyarakat melalui *press release* Berita Resmi Statistik (BRS) yang meliputi informasi statistik penting seperti inflasi, ekspor, impor, pariwisata, pertumbuhan ekonomi, produksi padi dan palawija, angka kemiskinan, dan pengangguran. Selain itu BPS juga melakukan diseminasi data dan informasi statistik baik melalui media cetak maupun elektronik.

Dalam mendukung terciptanya pemerintahan yang bersih dan berwibawa dilakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran yang menjadi tanggungjawab BPS secara intensif guna mencegah pemborosan sumber daya. Pengawasan dilakukan dengan meningkatkan pembinaan terhadap pengelolaan administrasi keuangan dan barang dalam rangka menuju tertib administrasi dan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan.

C. Potensi dan Permasalahan

C.1. Potensi yang Dimiliki

Secara kelembagaan, BPS telah ditegaskan sebagai instansi vertikal melalui Peraturan Presiden Nomor 86 tahun 2007. BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota merupakan bagian integral dari BPS Republik Indonesia secara keseluruhan. Perpres tersebut menjamin koordinasi vertikal dalam penyelenggaraan kegiatan statistik, terutama untuk menyediakan dan memberikan pelayanan data dan informasi statistik dasar baik di pusat maupun di daerah.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah (Pusat), Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, menempatkan BPS pada posisi strategis dalam mengembangkan Sistem Statistik Nasional, baik di pusat maupun daerah. BPS menjadi Badan yang bertanggungjawab dalam penyediaan data dan informasi statistik dasar, serta menjalankan fungsi koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan statistik sektoral oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Untuk itu, BPS mengeluarkan Peraturan Kepala BPS Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah yaitu dengan menetapkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK).

Dalam hal pengembangan sumber daya manusia (SDM) berkualitas, BPS mengelola Perguruan Tinggi yang menghasilkan tenaga statistik profesional setiap tahun, yaitu Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS). BPS juga mempunyai Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Statistik, yang berfungsi mengembangkan kompetensi SDM aparatur BPS maupun instansi pemerintah lainnya. Kedua unit tersebut merupakan potensi yang terus dikembangkan untuk mengatasi keterbatasan SDM statistik, khususnya di Wilayah Indoensia Bagian Timur. Di samping itu, BPS merupakan instansi pembina bagi jabatan fungsional statistisi dan jabatan fungsional pranata komputer.

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang pesat sangat potensial untuk menunjang kegiatan BPS. Peralatan dan perlengkapan untuk keperluan pengumpulan data, pengolahan data, maupun diseminasi data berbasis TIK mutakhir yang dimiliki BPS

merupakan potensi untuk meningkatkan kualitas dan mempercepat ketersediaan data dan informasi statistik.

Pengembangan juga dilakukan bagi potensi eksternal. Dewasa ini, data dan informasi statistik secara resmi digunakan Pemerintah sebagai rujukan untuk perumusan kebijakan, perencanaan, pemantauan, maupun evaluasi pembangunan. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) yang memuat sejumlah indikator kunci sebagai bahan evaluasi kinerja penyelenggaraan otonomi daerah, memerlukan ketersediaan data dan informasi statistik pada tingkat wilayah pemerintahan terkecil.

Sejalan dengan kondisi tersebut, secara nasional kepedulian masyarakat terhadap data dan informasi statistik yang dihasilkan BPS semakin meningkat, dan menjadi tuntutan yang tidak dapat dihindari. Menyikapi hal ini pemerintah dalam RPJM Nasional Tahun 2010-2014 menempatkan penguatan sistem data dan informasi statistik sebagai bagian dari sistem pendukung manajemen pembangunan nasional.

Dengan cakupan wilayah yang luas serta jumlah penduduk yang besar, posisi Indonesia menjadi strategis bagi kepentingan internasional. Perhatian dunia terhadap Indonesia selalu merujuk kepada data dan informasi statistik yang dihasilkan BPS. Beberapa negara di Asia-Pasifik dan Afrika juga banyak belajar dari BPS dalam penyelenggaraan kegiatan statistik. Kemampuan BPS dalam hal pengembangan statistik kemiskinan, sosial, ekonomi serta penyusunan berbagai indikator lainnya telah banyak diakui secara internasional.

Lembaga-lembaga internasional dibawah United Nations (antara lain UNDP, UNICEF, UNFPA, UNSD), World Bank, Asian Development Bank, EuroStat, AusAid, USAid, JICA, ASEAN Stat, dan lain-lain juga memberi bantuan dalam pembangunan statistik di Indonesia.

Millennium Development Goals (MDG's) yang telah disepakati oleh sebagian besar negara termasuk Indonesia, menjadi pendorong bagi penyelenggara maupun pemerhati statistik untuk lebih meningkatkan peran sertanya dalam menilai pencapaian kinerja pembangunan. Hal ini memperkuat kesadaran nasional akan pentingnya Sistem Statistik Nasional (SSN) yang terpadu, andal, efektif dan efisien.

C.2. Permasalahan yang Dihadapi

Permasalahan yang dihadapi dalam meningkatkan kualitas data mencakup permasalahan internal maupun eksternal. Permasalahan internal yang menonjol adalah terbatasnya sumber daya manusia (SDM) statistik yang profesional dan kompeten sesuai dengan bidang tugas, terutama di Wilayah Indonesia Bagian Timur. Hal ini sebagai dampak dari cepatnya pemekaran wilayah, yang juga membawa konsekuensi adanya beberapa kabupaten/kota yang belum mempunyai perwakilan BPS. Selain itu, sarana dan prasarana TIK yang dimiliki BPS belum seluruhnya sesuai dengan perkembangan teknologi terkini.

Permasalahan eksternal yang menonjol adalah rendahnya kesadaran responden, baik rumahtangga, perusahaan, maupun lembaga dalam memberikan informasi dengan benar. Hal ini menyebabkan kualitas data dan *response rate* yang rendah.

Permasalahan eksternal lain adalah belum terpenuhinya peningkatan kebutuhan ragam data dan informasi statistik wilayah kecil, termasuk data mikro. Hal ini muncul sebagai akibat dari diimplementasikannya kebijakan otonomi daerah. Untuk memenuhi kebutuhan data yang demikian, BPS terkendala dengan Undang-undang No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik yang tidak memperkenankan BPS menyajikan data individu. Sementara itu, ada pula anggapan masyarakat bahwa BPS adalah sumber dari segala sumber informasi. Hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang tugas pokok dan fungsi BPS.

Koordinasi antarinstansi masih belum optimal, sehingga terjadi duplikasi penyelenggaraan kegiatan statistik yang mengakibatkan penggunaan anggaran yang kurang efisien.

Permasalahan penting lainnya yaitu belum optimalnya implementasi 4 prinsip dasar dari 10 prinsip dasar penyelenggaraan statistik resmi yang direkomendasikan oleh PBB, antara lain:

- (i) *National Statistical Offices* (NSO) berhak untuk membetulkan dan mengklarifikasi apabila terjadi kekeliruan tafsir dan penyalahgunaan statistik.
- (ii) Informasi statistik diperoleh dari berbagai sumber baik melalui sensus, survei maupun catatan administrasi di mana NSO bertanggungjawab terhadap kualitas, ketepatan waktu, biaya dan beban pada responden.
- (iii) Koordinasi di antara penyelenggara statistik dan NSO adalah penting untuk mencapai sistem statistik yang konsisten dan efisien.

- (iv) Kerjasama bilateral dan multilateral dalam bidang statistik dianjurkan dalam kerangka perbaikan sistem statistik nasional di semua Negara.

BAB II

VISI, MISI, DAN TUJUAN BPS

A. Visi BPS

Visi BPS 2010-2014 dibangun dengan memperhatikan berbagai kekuatan dan kelemahan internal serta peluang dan tantangan yang dihadapi dari pihak luar dengan landasan pemikiran proaktif. Pembangunan nasional di bidang statistik diarahkan agar mampu mengakomodasi berbagai tantangan yang berkembang, seperti reformasi yang mendukung keterbukaan informasi, otonomi daerah yang mengandung tantangan keragaman data dan informasi statistik pada tingkatan wilayah kecil, perkembangan teknologi informasi yang mengarah kepada peningkatan kemudahan akses masyarakat akan data dan informasi, serta memperhatikan kesiapan SDM penyelenggara statistik dan kecenderungan pembatasan akses terhadap data dari responden/obyek kegiatan statistik.

Dengan mempertimbangkan berbagai hal tersebut, maka Visi BPS 2010-2014 disepakati sebagai berikut:

“Pelopor data statistik terpercaya untuk semua”

“The Agent of trustworthy statistical data for all”

BPS adalah lembaga pemerintah yang mempunyai tugas pokok menyediakan dan melakukan koordinasi ketersediaan data dan informasi statistik pada lingkup nasional maupun daerah. Kata “pelopor”

mempunyai makna bahwa BPS sebagai pencetus ide penyedia statistik terpercaya, sekaligus sebagai pelaku dalam penyediaan statistik terpercaya. Kata “data statistik yang terpercaya” yaitu statistik yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Kata “untuk semua” dimaksudkan bahwa semua pihak mempunyai hak yang sama untuk mengakses data BPS (*impartial*).

Dengan visi tersebut eksistensi BPS sebagai penyedia data dan informasi statistik menjadi semakin penting, karena dapat dipercaya semua pihak. BPS bukan hanya bagian dari pemerintah, tapi juga bagian dari keseluruhan masyarakat dan aspek kehidupan. Di samping itu, visi ini juga memberikan ruang yang cukup bagi peran serta berbagai pihak untuk ikut serta dalam menyediakan, memanfaatkan, dan menggunakan data dan informasi statistik.

Proses penyediaan data dan informasi statistik yang dihasilkan BPS menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat yang disebarluaskan melalui berbagai media dan berbagai cara agar pemanfaatannya berdaya jangkau luas, di dalam maupun di luar negeri.

B. Misi BPS

Pernyataan misi merupakan penjabaran serta rencana pelaksanaan program dan kegiatan agar mampu mencapai visi yang sudah ditetapkan.

Berdasarkan visi BPS, maka misi pembangunan nasional statistik Indonesia mencakup:

1. Memperkuat landasan konstitusional dan operasional lembaga statistik untuk penyelenggaraan statistik yang efektif dan efisien;
2. Menciptakan insan statistik yang kompeten dan profesional, didukung pemanfaatan teknologi informasi mutakhir untuk kemajuan perstatistikan Indonesia;
3. Meningkatkan penerapan standar klasifikasi, konsep dan definisi, pengukuran, dan kode etik statistik yang bersifat universal dalam setiap penyelenggaraan statistik;
4. Meningkatkan kualitas pelayanan informasi statistik bagi semua pihak;
5. Meningkatkan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi kegiatan statistik yang diselenggarakan pemerintah dan swasta, dalam kerangka Sistem Statistik Nasional (SSN) yang efektif dan efisien.

Misi pertama merujuk pada filosofi dasar bahwa untuk mewujudkan visi, BPS memerlukan landasan hukum yang kuat. Saat ini banyak perubahan yang mendasar yang menuju pada pentingnya peninjauan kembali Undang-undang Nomor 16 Tahun 19997 tentang Statistik.

Misi kedua, SDM dan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) menjadi dua pilar penting dalam penyelenggaraan SSN. BPS melalui STIS menghasilkan SDM yang profesional di bidang statistik dan komputasi statistik. Dengan dukungan TIK, maka SDM yang ada mampu mengimplemtasikan SSN secara efektif dan efisien.

Misi ketiga, BPS dalam menyelenggarakan statistik nasional mengacu pada 10 prinsip dasar yang direkomendasi PBB, yang di antaranya bahwa BPS harus menghasilkan data yang didasarkan pada metodologi yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Misi keempat, BPS sebagai pelayan publik dituntut untuk memberikan pelayanan prima. Misi ini menjadi bagian penting dan strategis dalam mewujudkan visi BPS, yaitu sebagai pelopor penyedia data dan informasi statistik untuk semua.

Misi kelima, BPS sebagai penanggung jawab terlaksananya SSN, perlu melakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan efektif dan efisien.

C. Tujuan

Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik mengamanatkan BPS untuk menyediakan data dan informasi statistik pada skala nasional maupun regional, serta melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan statistik.

Tujuan utama dalam pembangunan nasional di bidang statistik lima tahun ke depan adalah meningkatkan ketersediaan data dan informasi statistik yang berkualitas serta pelayanan prima dalam rangka mewujudkan SSN yang andal, efektif, dan efisien. Untuk itu, BPS perlu meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait, integrasi, sinkronisasi, dan standarisasi kegiatan statistik.

Dalam rangka mengantisipasi lingkungan strategis yang berkembang, maka pembangunan statistik dilakukan melalui reformasi birokrasi dengan menerapkan program Statcap CERDAS (*Statistical Capacity Building – Change and Reform for Development of Statistics in Indonesia*). Empat pilar reformasi birokrasi dilakukan dalam tempo 2010-2014, meliputi: (i). Peningkatan kualitas data, (ii). Pembinaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, (iii). Penguatan Teknologi

Informasi dan Komunikasi (TIK) serta sarana kerja, dan (iv). Penguatan kelembagaan dan hubungan dengan sumber data dan pengguna data.

D. Sasaran Strategis BPS

Secara ringkas sasaran strategis pembangunan statistik nasional Indonesia dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Tersedianya data dan informasi statistik yang lengkap, akurat, dan tepat waktu di seluruh bidang pembangunan serta meningkatkan pelayanan bagi pengguna data dan informasi statistik;
2. Terwujudnya struktur organisasi BPS secara efektif dan efisien dalam kerangka mewujudkan *good governance* serta meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS;
3. Meningkatnya kapasitas SDM dalam pengetahuan, penguasaan ilmu, metoda statistik, dan teknologi informasi mutakhir guna menyempurnakan metoda pengumpulan, pengolahan dan diseminasi statistik;
4. Meningkatnya kerjasama antarlembaga statistik/penelitian dalam negeri maupun internasional atas dasar saling menghormati kemandirian dan menguntungkan dalam rangka menghasilkan data dan informasi statistik berkualitas internasional;
5. Terwujudnya SSN dalam menunjang kelancaran tugas dan fungsi lembaga-lembaga statistik yang ada baik di instansi pemerintah, swasta maupun masyarakat; dan
6. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana fisik.

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis BPS dapat diukur dengan berbagai indikator utama, seperti meningkatnya kepercayaan

pengguna data terhadap data dan informasi statistik yang dihasilkan, kemudahan akses pengguna dalam memperoleh data dan informasi statistik secara cepat, terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana pendukung, khususnya dalam rangka pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), serta keberhasilan pengelolaan akuntabilitas administrasi keuangan dan kinerja menuju opini “wajar tanpa pengecualian” terhadap Laporan Keuangan.

BAB III

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

A. Strategi dan Arah Kebijakan Nasional

Prioritas pembangunan jangka menengah di bidang data dan informasi statistik adalah peningkatan kualitas statistik nasional. Kualitas data diukur dalam enam dimensi, yaitu akurat, relevan, tepat waktu/*timeliness*, mudah diakses/*accessibility*, koheren/*coherence* yang berarti konsisten antarsektor dan antarperiode dan spasial, serta mudah diinterpretasi/*interpretability*.

Untuk mewujudkan sasaran tersebut dirumuskan tiga langkah; (1) peningkatan kualitas data, (2) peningkatan penerapan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), dan (3) peningkatan kapasitas SDM dan penataan kelembagaan.

Statistik bermutu tinggi dan dapat diandalkan yang dihasilkan secara tepat waktu merupakan bagian esensial dalam proses perumusan suatu kebijakan. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya kualitas data dan informasi statistik ekonomi, meningkatnya kualitas data dan informasi statistik kesejahteraan rakyat, meningkatnya manajemen survei, meningkatnya metodologi survei, meningkatnya dan berkembangnya analisis statistik, meningkatnya hubungan dengan pengguna data meningkatnya efektivitas dan efisiensi diseminasi data dan informasi statistik, serta meningkatnya penerapan teknologi informasi dan komunikasi. Peningkatan kualitas data dan informasi statistik selama ini

baru terfokus kepada perbaikan metodologi dan teknis statistik. Saat ini perbaikan yang dilakukan diharapkan mulai menyentuh seluruh aspek seperti penelaahan kembali proses ketatalaksanaan (*business process review*), pengembangan kapasitas TIK, dan peningkatan kapasitas dan kemampuan SDM serta penataan kelembagaan. Keberhasilan upaya peningkatan kualitas data dan informasi statistik ini tidak terlepas dari dukungan dan peranan TIK, yang diwujudkan melalui pembangunan arsitektur dan kerangka TIK dan manajemen informasi. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya penggunaan TIK statistik. Keberhasilan peningkatan kualitas data dan informasi statistik juga sangat memerlukan dukungan dan peranan dari SDM. Hal ini menunjukkan meningkatnya kapasitas dan kemampuan tenaga statistik di pusat maupun daerah.

Pembangunan kapasitas dan penyediaan data dan informasi statistik nasional direncanakan akan dilakukan melalui sebuah program teknis kestatistikan, yaitu program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik. Program ini akan menjadi sebuah rencana kerja institusi penyedia data dan informasi statistik, baik di pusat maupun daerah.

B. Strategi dan Arah Kebijakan BPS

B.1. Strategi

Peningkatan kualitas data menjadi salah satu sasaran strategis yang akan dicapai BPS dalam mendukung strategi dan arah kebijakan nasional. Sejalan dengan strategi dan arah kebijakan BPS, selama lima tahun ke depan BPS perlu mengupayakan reformasi dan perubahan terhadap pembangunan statistik secara menyeluruh. Sebagai upaya

meningkatkan kualitas data dan meningkatkan kualitas penyajian perlu dilakukan pembenahan-pembenahan, antara lain memenuhi kebutuhan perangkat TIK dan meningkatkan kualitas SDM. Proses peningkatan kualitas data ini, pada gilirannya akan dicerminkan oleh berkurangnya *timelines* penyajian data, dan meningkatkan kualitas penyajian, serta memberikan kemudahan kepada pengguna data untuk mengakses data.

Perkembangan situasi global, perkembangan TIK, dan peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya statistik di masa mendatang memungkinkan munculnya berbagai tantangan dalam pembangunan statistik di Indonesia. Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini dirasakan berdampak terhadap permintaan data dan informasi statistik yang semakin beragam, akurat, berkesinambungan, dan tepat waktu. Permintaan data dan informasi semacam ini tidak hanya datang dari pemerintah, tetapi juga datang dari masyarakat.

Dalam rangka mewujudkan Sistem Statistik Nasional (SSN) yang andal, efektif dan efisien, maka program pembangunan statistik diarahkan untuk meningkatkan ketersediaan data dan informasi statistik terpercaya yang berkualitas. Peningkatan kapasitas kegiatan statistik di BPS dilakukan untuk menjawab peningkatan permintaan terhadap data dan informasi statistik dalam mendukung penyelenggaraan otonomi daerah.

Kapasitas teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di BPS saat ini juga belum seluruhnya sesuai dengan kemajuan teknologi komputasi yang diperlukan untuk mempercepat pengumpulan, pengolahan, dan diseminasi data yang cakupan maupun kuantitasnya semakin bertambah. Untuk mengimplementasikan Sistem Statistik Nasional

dengan memanfaatkan TIK diperlukan sarana dan prasarana yang memadai.

Sumber daya manusia yang kurang memadai baik kuantitas maupun kualitas merupakan situasi yang benar-benar memprihatinkan pada tingkat BPS Daerah, khususnya di tingkat Kabupaten/Kota dan Kecamatan. Dengan adanya Sekolah Tinggi Ilmu Statistik dan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Statistik secara bertahap diharapkan mampu memenuhi kebutuhan SDM.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan data yang berkualitas, pemanfaatan TIK, dan peningkatan kapasitas SDM berdampak kepada kondisi kelembagaan. Oleh karena itu kelembagaan BPS perlu dilakukan penataan kembali sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan lingkungan strategis.

Berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan, serta mengacu pada strategi pembangunan nasional di bidang statistik dalam RPJM Nasional, maka BPS menetapkan strategi-strategi yang merupakan serangkaian aktivitas utama untuk mencapai sasaran-sasaran proses. Strategi-strategi tersebut diuraikan untuk setiap sasaran proses dan dikelompokkan dalam tiga bidang yang meliputi:

- a) Strategi Bidang Peningkatan Kualitas dan Keragaman Data.
- b) Strategi Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).
- c) Strategi Bidang Peningkatan Kapasitas dan Kemampuan SDM serta Penataan Kelembagaan.

I. Strategi Bidang Peningkatan Kualitas Data dan Keragaman Data

Strategi ini merupakan sarana untuk mencapai apa yang diharapkan dari misi ketiga dan keempat BPS. Misi ketiga BPS yaitu meningkatkan penerapan standar klasifikasi, konsep dan definisi, pengukuran, dan kode etik statistik yang bersifat universal dalam setiap penyelenggaraan statistik. Misi keempat BPS yaitu meningkatkan kualitas pelayanan informasi statistik bagi semua pihak. Strategi ini diarahkan untuk mencapai sasaran strategis dalam rangka perkuatan sistem data dan informasi statistik. Adapun tujuan strategi ini adalah untuk mengoptimalkan kualitas data dan informasi statistik yang dihasilkan oleh BPS.

Strategi ini terdiri atas beberapa rangkaian aktivitas utama untuk mencapai sasaran prioritas. Setiap strategi diawali dengan penyusunan Analisis Proses Ketatalaksanaan/*Business Process Analysis (BPA)* dan Rekayasa Ulang Proses Ketatalaksanaan/*Business Process Reengineering (BPR)*. Adapun sasaran dan strategi-strategi tersebut diuraikan di bawah ini:

a) Sasaran-1: Meningkatkan Kualitas dan Keragaman Data dan informasi statistik Ekonomi.

Sasaran ini dicapai dengan menempuh langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melaksanakan Sensus Pertanian 2013 yang berkualitas;
2. Membangun dan mengaplikasikan Sistem Neraca Nasional Indonesia berdasarkan *System of National Account (SNA)* 2008 untuk neraca-neraca pokok seperti Neraca Produksi, Neraca Penerimaan dan Pengeluaran (*generating of income accounts*),

Neraca Kapital, dan Neraca Finansial di BPS Pusat dan BPS Daerah sehingga terwujud data neraca nasional yang terbandingkan antarnegara;

3. Memperbaiki ketersediaan data dasar yang diperlukan bagi penerapan SNA 2008, berdasarkan *gap analysis* (analisis kebutuhan dan ketersediaan);
4. Melakukan koordinasi dengan penyelenggara statistik sektoral guna meningkatkan kualitas data dari instansi sektoral, berdasarkan *gap analysis* (analisis kebutuhan dan ketersediaan);
5. Memperbaiki sistem pengolahan data untuk SNA 2008;
6. Melakukan perubahan tahun dasar PDB dan PDRB dari tahun 2000 menjadi tahun 2010 agar statistik PDB dan PDRB, serta pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan oleh BPS menjadi *reliable*;
7. Mengubah sistem pengumpulan data Survei Industri Besar/Sedang Tahunan yang semula dilakukan dengan pendekatan sensus menjadi dua pendekatan, untuk Survei Industri Besar melalui pendekatan sensus sedangkan Survei Industri Sedang melalui pendekatan survei sampel;
8. Menerapkan pengukuran peningkatan kualitas statistik pertanian;
9. Meningkatkan kualitas statistik harga dengan menyelenggarakan Survei Biaya Hidup dan menghitung Diagram Timbangan Nilai Tukar Petani pada tahun 2012, serta menyempurnakan sistem pengumpulan, pengolahan, dan penyajian statistik harga;
10. Membangun statistik harga produsen;
11. Menerapkan pengukuran peningkatan kualitas data dan informasi statistik Ekspor-Impor;

12. Menerapkan pengukuran peningkatan kualitas data dan informasi statistik Konstruksi;
13. Menerapkan pengukuran peningkatan kualitas data dan informasi statistik Pertambangan dan Energi;
14. Menerapkan pengukuran peningkatan kualitas data dan informasi statistik Keuangan;
15. Menerapkan pengukuran peningkatan kualitas data dan informasi statistik Pariwisata;
16. Menerapkan pengukuran peningkatan kualitas data dan informasi statistik Teknologi Informasi dan Komunikasi;
17. Menerapkan pengukuran peningkatan kualitas data dan informasi statistik Perdagangan Dalam Negeri;
18. Menerapkan pengukuran peningkatan kualitas data dan informasi statistik Perhubungan;
19. Memperbaiki sistem pengolahan data survei berbasis perusahaan maupun rumah tangga.

b) Sasaran-2: Meningkatkan Kualitas Data dan Informasi Statistik Sosial dan Kesejahteraan Rakyat.

Sasaran ini dicapai dengan menempuh langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melaksanakan Sensus Penduduk 2010 yang berkualitas;
2. Menerapkan pengukuran peningkatan kualitas data dan informasi statistik demografi;
3. Menerapkan pengukuran peningkatan kualitas data Survei Sosial-Ekonomi Nasional (SUSENAS);

4. Menerapkan pengukuran peningkatan kualitas data Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS);
5. Menerapkan pengukuran peningkatan kualitas data Survei Upah dan Struktur Upah;
6. Menerapkan pengukuran peningkatan kualitas data dan informasi statistik kemiskinan;
7. Menerapkan pengukuran peningkatan kualitas data dan informasi statistik ketahanan sosial.

c) Sasaran-3: Meningkatkan Manajemen Survei

Sasaran ini dicapai dengan menempuh langkah-langkah sebagai berikut:

1. Memperbaiki *response rate*;
2. Memperbaiki metoda pengumpulan data dan *monitoring/* pemantauan.

d) Sasaran-4: Meningkatkan Metodologi Sensus dan Survei.

Sasaran ini dicapai dengan menempuh langkah-langkah sebagai berikut:

1. Memperbaiki kerangka sampel bagi survei berbasis rumah tangga maupun perusahaan/usaha;
2. Memperbaiki peta wilayah kerja statistik dan wilayah administrasi (desa/kelurahan) untuk keperluan pengumpulan dan penyajian data dan informasi statistik;
3. Menyempurnakan klasifikasi dan standarisasi statistik untuk keperluan pengumpulan, penyajian, dan analisis statistik;
4. Menerapkan desain sensus dan survei yang optimal.

e) Sasaran-5: Meningkatkan dan Mengembangkan Analisis Statistik.

Sasaran ini dicapai dengan menempuh langkah-langkah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas statistik lintas sektor;
2. Meningkatkan konsistensi statistik lintas sektor;
3. Membangun Sistem Manajemen Kualitas Total.

f) Sasaran-6: Meningkatkan Hubungan dengan Pengguna Data.

Sasaran ini dicapai dengan menempuh langkah-langkah sebagai berikut:

1. Memperbaiki kepuasan pelanggan;
2. Memperbaiki kemitraan dengan penyedia data;
3. Memperbaiki komunikasi dengan pengguna data dan penyedia data.

g) Sasaran-7: Meningkatkan Efektifitas dan Efisiensi Diseminasi Data dan Informasi Statistik.

Sasaran ini dicapai dengan menempuh langkah-langkah sebagai berikut:

1. Memperbaiki kemudahan akses terhadap data BPS;
2. Memperbaiki kualitas layanan dan hasil-hasil (data dan informasi statistik);
3. Meningkatkan penggunaan Si Rusa, kompilasi metadata dalam kerangka Sistem Rujukan Statistik.

II. Strategi Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi

Untuk mencapai apa yang diharapkan dari misi kedua BPS yaitu menciptakan insan statistik yang kompeten dan profesional, didukung pemanfaatan teknologi informasi mutakhir untuk kemajuan perstatistikan Indonesia, maka dirumuskan strategi bidang teknologi informasi dan komunikasi. Strategi ini diarahkan untuk mencapai sasaran strategis dalam rangka perkuatan sistem basis data. Adapun tujuan strategi ini adalah untuk mengoptimalkan sarana dan prasarana yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi mutakhir.

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, BPS merumuskan beberapa strategi pembangunan arsitektur dan kerangka kerja teknologi informasi komunikasi dan manajemen informasi melalui serangkaian aktivitas utama untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Sasaran: Meningkatkan Sarana dan Prasarana TIK Dalam Rangka Memperbaiki Kinerja BPS Secara Efektif dan Efisien.

Sasaran ini dicapai dengan menempuh langkah-langkah sebagai berikut:

1. Membuat Analisis Proses Ketatalaksanaan dan Rekayasa Ulang Proses Ketatalaksanaan untuk Sistem Informasi Statistik;
2. Memperbaiki layanan online untuk pengguna data internal maupun eksternal;
3. Membangun Standardisasi TIK (TIK arsitektur, prosedur, perangkat keras dan perangkat lunak);
4. Memperbaiki sarana dan prasarana TIK secara umum;

5. Memperbaiki Organisasi dan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi.

III. Strategi Bidang Peningkatan Kapasitas SDM dan Penataan Kelembagaan

Strategi ini merupakan sarana untuk mencapai apa yang diharapkan dari misi BPS yang kesatu, kedua dan kelima. Misi kesatu BPS yaitu memperkuat landasan konstitusional dan operasional lembaga statistik untuk penyelenggaraan statistik yang efektif dan efisien. Misi kedua BPS yaitu menciptakan insan statistik yang kompeten dan profesional, didukung pemanfaatan teknologi informasi mutakhir untuk kemajuan perstatistikan Indonesia. Misi kelima BPS yaitu meningkatkan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi kegiatan statistik yang diselenggarakan pemerintah dan swasta, dalam kerangka Sistem Statistik Nasional (SSN) yang efektif dan efisien. Strategi ini diarahkan untuk mencapai sasaran strategis dalam rangka peningkatan kapasitas SDM dan penataan kelembagaan. Adapun tujuan strategi ini adalah untuk meningkatkan kinerja aparatur BPS.

Keberhasilan peningkatan kualitas data dan informasi statistik juga sangat memerlukan dukungan dan peranan dari SDM serta pengelolaan kelembagaan yang efektif dan efisien. Oleh karena itu, pembangunan SDM dan penataan kelembagaan merupakan bagian strategis dalam pembangunan statistik nasional lima tahun ke depan.

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, BPS merumuskan beberapa strategi untuk melakukan pembangunan sumber daya manusia dan penataan kelembagaan, yang terdiri atas

serangkaian aktivitas utama untuk mencapai sasaran-sasaran yang ditetapkan.

a) Sasaran-1: Memperbaiki Sumber Daya Manusia.

Sasaran ini dicapai dengan menempuh langkah-langkah sebagai berikut:

1. Membuat Analisis Proses Ketatalaksanaan dan Rekayasa Ulang Proses Ketatalaksanaan untuk kondisi sumber daya manusia BPS;
2. Melakukan analisis kesenjangan (*gap analysis*) antara kondisi saat ini dan kebutuhan di masa yang akan datang;
3. Memperbaiki perilaku individu dalam bekerja (*code of conduct*) untuk setiap aparatur BPS;
4. Membangun kebijakan dan prosedur pengembangan sumber daya manusia;
5. Memperbaiki penerimaan dan penempatan sumber daya manusia pada semua level, baik di Pusat maupun Daerah;
6. Membangun perencanaan karir;
7. Membangun sistem informasi sumber daya manusia untuk mendukung implementasi kebijakan SDM;
8. Memperbaiki kualitas pendidikan Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS);
9. Memperbaiki efektivitas pusat pendidikan dan pelatihan.

b) Sasaran-2: Memperbaiki Struktur Organisasi BPS Secara Efektif dan Efisien Dalam Kerangka Mewujudkan *Good Governance*.

Sasaran ini dicapai dengan menempuh langkah-langkah sebagai berikut:

1. Meningkatkan integrasi, sinkronisasi dan sinergi antarunit di BPS Pusat dan antara BPS Pusat dengan BPS Daerah, serta dengan instansi terkait dalam rangka terwujudnya perencanaan kegiatan BPS yang berkualitas;
2. Membuat Analisis Proses Ketatalaksanaan dan Rekayasa Ulang Proses Ketatalaksanaan kelembagaan BPS;
3. Mereview dan mengamandemen UU No 16 Tahun 1997 tentang Statistik diikuti dengan perubahan terhadap peraturan perundangan pelaksanaannya;
4. Melakukan reorganisasi berdasarkan kondisi lingkungan kerja di masa yang akan datang;
5. Menyesuaikan dan memperbaiki kerangka hukum dan peraturan untuk mendukung administrasi kegiatan statistik;
6. Mengembangkan dan mengimplementasikan budaya kerja BPS;
7. Membangun Sistem Perencanaan Sumber Daya Terpadu;
8. Membangun sistem manajemen dokumen;
9. Memperbaiki proses pengambilan keputusan strategis dan peningkatan proses arus informasi untuk mendukung pengambilan keputusan.

c) Sasaran-3: Meningkatkan Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja Aparatur BPS.

Sasaran ini dicapai dengan menempuh langkah-langkah sebagai berikut:

1. Membangun peraturan pengawasan dan pemeriksaan internal BPS;
2. Melakukan pengawasan dan pemeriksaan kegiatan-kegiatan BPS secara intensif;

3. Meningkatkan kualitas pengawasan dan pemeriksaan terhadap seluruh satuan kerja BPS;
4. Membangun sistem pengawasan dan pemeriksaan yang baru, efektif dan efisien;
5. Melakukan pembinaan terhadap penyelenggara administrasi;
6. Melaksanakan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan BPS secara efektif.

d) Sasaran-4: Meningkatkan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS.

Sasaran ini dicapai dengan menempuh langkah-langkah sebagai berikut:

1. Membangun dan merenovasi gedung kantor yang memadai sesuai dengan kebutuhan organisasi dan jumlah SDM;
2. Membangun dan merenovasi rumah dinas yang layak huni sesuai kebutuhan organisasi;
3. Mencukupi kebutuhan kendaraan operasional lapangan dalam rangka mempercepat proses kegiatan statistik;
4. Melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana.

B.2. Arah Kebijakan

Sebagai tindak lanjut Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran yang sudah ditetapkan, BPS menentukan arah kebijakan Pembangunan Statistik Nasional sebagai berikut:

- a. Melakukan review terhadap UU No 16 Tahun 1997 tentang Statistik berikut peraturan perundangan pelaksanaannya. UU No 16 tahun 1997 perlu ditinjau kembali, terutama terkait struktur organisasi BPS

di pusat dan daerah, penegasan peran BPS dalam koordinasi dengan penyelenggara kegiatan statistik sektoral dalam kerangka penyusunan statistik sektoral yang andal dan efektif dan pemanfaatan produk administrasi instansi sebagai sumber penyusunan statistik dasar. Koordinasi dengan instansi sektoral seharusnya seiring dengan amanat PP No 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah (Pusat), Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Implementasi pelaksanaan PP No 41 tahun 2007 tentang rumpun kegiatan perangkat daerah juga perlu ditindaklanjuti dengan asas vertikalitas BPS daerah agar terhindar kesimpangsiuran interpretasi dan implementasi PP No 38 Tahun 2007.

- b. Memelopori terselenggaranya kegiatan statistik yang efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang andal dan prima dengan berlandaskan kepada asas keterpaduan, keakurasian, dan pemutakhiran. Keterpaduan mempunyai makna bahwa penyelenggaraan kegiatan statistik yang dilakukan bersama-sama oleh pemerintah dan masyarakat harus saling mengisi dan saling memperkuat dalam memenuhi kebutuhan data dan informasi statistik, serta menghindari terjadinya duplikasi kegiatan. Prinsip keakurasian mengandung makna bahwa semua kegiatan statistik harus diupayakan untuk menghasilkan data dan informasi statistik yang seksama, cermat, tepat, dan benar. Sedangkan kemutakhiran berarti bahwa data dan informasi statistik yang disajikan atau yang tersedia harus dapat menggambarkan fenomena atau perubahannya menurut keadaan yang terkini. Oleh karena itu, pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisis serta diseminasi data dan

informasi statistik harus senantiasa diupayakan secara terus menerus, berkesinambungan, dan runtun waktu.

- c. Mewujudkan kondisi yang mendukung penerapan atas Norma, Standard, Prosedur, dan Kriteria (NSPK). NSPK akan mempermudah pengguna dalam menganalisis data dan informasi statistik dan dapat melakukan perbandingan antara data yang satu dengan lainnya, baik perbandingan dalam skala regional, nasional, maupun internasional.
- d. Memfasilitasi peningkatan penguasaan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi, khususnya ilmu statistik, melalui penelitian-penelitian maupun studi. Penguasaan dan pengembangan ilmu pengetahuan ini terutama ditujukan untuk mencapai penyelenggaraan kegiatan statistik yang lebih efektif dengan kualitas hasil yang mendorong peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap data dan informasi statistik yang disajikan.
- e. Mengupayakan terwujudnya sistem informasi statistik yang andal dan efisien dengan memanfaatkan teknologi mutakhir yang tepat guna dan berhasil guna. Hasil kegiatan statistik akan sia-sia bila tidak dimanfaatkan para pengguna. Sistem informasi statistik merupakan sarana untuk menyebarluaskan hasil kegiatan statistik, baik kepada pemerintah maupun masyarakat luas.
- f. Mengupayakan pembinaan dalam pengembangan sistem informasi statistik terhadap seluruh penyelenggara kegiatan statistik nasional. Penguasaan teknologi informasi masih belum merata pada penyelenggara kegiatan statistik. Kesetaraan pengetahuan tentang teknologi informasi akan menunjang pengembangan Sistem Statistik Nasional yang terpadu.

- g. Memelopori peningkatan kemampuan para pelaksana kegiatan statistik dalam menyelenggarakan dan menyajikan data dan informasi statistik. Kualitas SDM pelaksana kegiatan statistik sangat berpengaruh terhadap kualitas data dan informasi statistik yang dihasilkan dan disajikan. Tingginya kualitas SDM pelaksana akan menghasilkan data dan informasi statistik yang bermutu tinggi.
- h. Mengupayakan peningkatan kesadaran masyarakat akan arti penting dan kegunaan statistik. Selain tergantung kepada kualitas pelaksana, mutu data dan informasi statistik juga dipengaruhi oleh sumber data. Masyarakat sebagai sumber data akan ikut menentukan kualitas data yang dihasilkan, mengingat data yang diperoleh sangat tergantung kepada mutu jawaban yang diberikan masyarakat sebagai sumber data.
- i. Mengupayakan pembinaan untuk pendayagunaan satuan kerja bidang statistik di semua lembaga pemerintah maupun swasta. Satuan kerja bidang statistik di berbagai lembaga tersebut belum mempunyai pengetahuan yang merata di bidang statistik, penyetaraan pengetahuan tentang statistik diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembangunan statistik. Salah satu upaya BPS mencakup fasilitasi terhadap tenaga-tenaga fungsional statistisi maupun pranata komputer pada instansi-instansi sektoral, baik di tingkat instansi pusat maupun perangkat daerah.
- j. Mengupayakan penyediaan kelengkapan peralatan teknologi informasi seperti *notebook/laptop* untuk petugas Koordinator Statistik Kecamatan (KSK) dalam rangka pengembangan teknik pengumpulan data dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi melalui sistem elektronik survei.

C. Program dan Kegiatan

Sebagai Lembaga Pemerintah Non-Kementrian, BPS mempunyai satu Program Teknis dan tiga Program Generik. Program Teknis BPS adalah *Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (P2IS)*. Adapun Program Generik BPS meliputi: (i) *Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Kegiatan Teknis Lainnya BPS*, (ii) *Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (PSPA) BPS*, (iii) *Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Negara (P2A2N) BPS*.

Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (P2IS) bertujuan untuk menyediakan dan memberi pelayanan informasi statistik yang berkualitas dalam rangka memenuhi kebutuhan pengguna data. Untuk menyediakan data dan informasi statistik, BPS secara berkesinambungan menyempurnakan dan mengembangkan kegiatan pengumpulan, pengolahan, pengkajian dan analisis, serta diseminasi data dan informasi statistik.

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Kegiatan Teknis Lainnya BPS bertujuan untuk memberi dukungan manajemen dan kelancaran pelaksanaan kegiatan teknis di bidang penyediaan data dan informasi statistik yang berkualitas. Dasar kebijaksanaan dalam rencana anggaran program ini diarahkan untuk kegiatan-kegiatan operasional penyelenggaraan lembaga seperti perencanaan program dan kegiatan, pemantauan dan evaluasi kegiatan, penyediaan gaji pegawai, peningkatan kapasitas SDM, dan fungsi kehumasan.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (PSPA) BPS bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan sarana dan prasarana fisik yang telah ada di BPS, antara lain kenyamanan dan kelengkapan fasilitas ruang kerja, serta penyediaan rumah dinas dan sarana transportasi untuk pusat dan daerah.

Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Negara (P2A2N) BPS bertujuan untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan kegiatan, pengelolaan administrasi keuangan dan administrasi barang di seluruh satuan kerja BPS Pusat maupun Daerah. Program ini diarahkan untuk memperoleh penilaian BPK dengan opini wajar tanpa pengecualian bagi laporan keuangan BPS.

Setiap Program dijabarkan menjadi kegiatan-kegiatan yang menjadi tanggungjawab masing-masing unit Eselon II di BPS Pusat. Program Teknis BPS Provinsi adalah Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (P2IS), yang merupakan dekonsentrasi kegiatan dari masing-masing Eselon II di BPS (Pusat). Sedangkan untuk Program Generik, pada setiap Satuan Kerja Eselon II BPS Provinsi disediakan dua program, yaitu: (i) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Kegiatan Teknis Lainnya BPS Provinsi, dan (ii) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (PSPA) BPS Provinsi. Demikian pula bagi BPS Kabupaten/Kota disediakan Program Teknis dan Program Generik yang sama dengan BPS Provinsi.

Dari 26 Kegiatan yang menjadi tanggungjawab unit Eselon II BPS Pusat, ditentukan 10 prioritas kegiatan. Penentuan prioritas didasarkan kepada:

- (i) Amanat UU No 16 Tahun 1997 tentang Statistik, yakni penyelenggaraan Sensus, meliputi Sensus Penduduk 2010, Sensus Pertanian 2013 dan persiapan Sensus Ekonomi 2016.
- (ii) Penyediaan data strategis yang mendukung Visi dan Misi RPJM Nasional, meliputi kegiatan statistik berskala besar dan lintas sektor: Penyediaan dan Pengembangan Statistik Neraca Nasional dan Regional, Penyediaan dan Pengembangan Statistik Harga, Penyediaan dan Pengembangan Statistik Rumah Tangga melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) dan Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS), Penyediaan dan Pengembangan Data Kemiskinan, Penyediaan dan Pengembangan Data dan informasi statistik Industri Besar/Sedang, Survei Biaya Hidup dan Survei Diagram Timbangan Nilai tukar Petani 2012, serta Sensus Potensi Desa 2013.

Secara lengkap setiap kegiatan beserta indikator kinerja utama, target pencapaian dan alokasi anggaran yang dibutuhkan di sajikan dalam Lampiran 1 dan Lampiran 2. Tabel 1 berikut menyajikan indikator kinerja utama yang disandingkan dengan target pencapaiannya pada 2010 dan 2014 untuk kegiatan-kegiatan fokus prioritas. Tabel 2 menunjukkan alokasi anggaran yang dibutuhkan dalam rangka mencapai sasaran dan capaian program selama 2010-2014.

Tabel 1. Indikator Kinerja Utama, Kegiatan Prioritas BPS 2010-2014

No	Kegiatan/Fokus Kegiatan	Output	Indikator Kinerja Utama	Target	
				2010	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	<u>Kegiatan :</u> 1. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kependudukan Dan Ketenagakerjaan 2. Pengembangan Metodologi Sensus Dan Survei 3. Pengembangan Sistem Informasi Statistik <u>Fokus Kegiatan :</u> Sensus Penduduk 2010	Terselenggaranya kegiatan Sensus Penduduk 2010 dan tersedianya parameter demografi dan indikator-indikator MDG's serta targeting beberapa kebijakan sosial	1. Tersedia data dan informasi statistik wilayah kecil di bidang kependudukan 2. Tersedia proyeksi penduduk 2010-2020 3. Tersedia indikator untuk perencanaan, evaluasi, dan analisis sosial, seperti pendidikan, lansia, perumahan, dan kecacatan, serta capaian MDG's	Angka sementara: Agustus 2010 Angka final: Juli 2011 ---- ---- Selesai 2012 Selesai 2012	
2	<u>Kegiatan :</u> Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kependudukan Dan Ketenagakerjaan <u>Fokus Kegiatan :</u> Survei Angkatan Kerja Nasional	Tersedianya data dan informasi statistik tenaga kerja dan pengangguran pada Tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota	Tersedia indikator pengangguran dan kesempatan kerja	Dua kali setahun	Tiap triwulan

No	Kegiatan/Fokus Kegiatan	Output	Indikator Kinerja Utama	Target	
				2010	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3	<u>Kegiatan :</u> 1. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan 2. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan 3. Pengembangan Metodologi Sensus Dan Survei <u>Fokus Kegiatan :</u> Sensus Pertanian 2013	Tersedianya data base statistik pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan 2013	1. Persiapan pada 2011 dan 2012 2. Pelaksanaan Listing pada 2013 3. Penyajian pada 2014 dan pelaksanaan survei sub sektor dan survey pendapatan petani pada 2014	2011: Pilot studi 2012: Gladi bersih	Penyajian dan analisis hasil Sensus Pertanian 2013
4	<u>Kegiatan :</u> 1. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Distribusi 2. Pengembangan Metodologi Sensus Dan Survei <u>Fokus Kegiatan :</u> Sensus Ekonomi 2016 (Tahap Persiapan)	Terlaksananya uji coba instrumen penyeleng-garaan Sensus Ekonomi 2016	Pilot survei daftar listing Sensus Ekonomi 2016	---	Tersedianya kuesioner dan Buku Pedoman Listing Sensus Ekonomi 2016

No	Kegiatan/Fokus Kegiatan	Output	Indikator Kinerja Utama	Target	
				2010	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5	<u>Kegiatan :</u> Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kesejahteraan Rakyat <u>Fokus Kegiatan :</u> <i>Survei Sosial Ekonomi Nasional</i>	Tersedianya data dan informasi statistik kesejahteraan rakyat Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota, yang meliputi data karakteristik rumah tangga, pendidikan, pekerjaan, dan kesehatan	1. Standar error (s.e) data hasil Susenas menurun 2. Menurunnya non sampling error	Semua variabel dan semua daerah tidak melebihi 40 % s.e. Jadwal pelaksanaan tepat waktu	Semua variabel dan semua daerah tidak melebihi 40 % s.e. Tidak ada penggantian sampel
6	<u>Kegiatan :</u> 1. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Neraca Produksi 2. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Neraca Pengeluaran <u>Fokus Kegiatan :</u> <i>Penyusunan Neraca Nasional dan Regional</i>	Tersedianya data pertumbuhan ekonomi Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota setiap triwulan dan tahunan	1. Perubahan tahun dasar, dari 2000= 100, menjadi 2010= 100 mulai 2011 2. Penurunan deskrepansi PDRB dengan PDB	Tahun dasar 2000=100 Diskrepansi PDB dengan PDRB prop kurang dari 15 % (ADHB) dan kurang dari 6 % (ADHK)	Tahun dasar 2010= 100 mulai 2011 Diskrepansi PDB dengan PDRB kurang dari 10 % (ADHB) dan kurang dari 4 % (ADHK)
7	<u>Kegiatan :</u> Penyediaan dan Pengembangan Statistik Harga <u>Fokus Kegiatan :</u> <i>Penyusunan Statistik Harga Konsumen dan Harga Pedesaan</i>	Tersedianya data Inflasi dan Nilai Tukar Petani (NTP) di seluruh provinsi dan nasional setiap bulan serta beberapa kabupaten Utama	1. Tersajinya data harga, Indeks harga, dan inflasi 2. Tersajinya data harga pedesaan dan NTP setiap bulan	1. Cakupan: 66 kota, 774 komoditas, dengan Tahun dasar 2007 2. Cakupan 32 Provinsi dengan Tahun dasar 2007	1. Cakupan: 80 kota, 800 komoditas dengan Tahun dasar 2012 2. Cakupan 33 Provinsi dengan Tahun dasar: 2012

No	Kegiatan/Fokus Kegiatan	Output	Indikator Kinerja Utama	Target	
				2010	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
8	<u>Kegiatan :</u> Penyediaan dan Pengembangan Statistik Harga <u>Fokus Kegiatan :</u> <i>Survei Biaya Hidup (SBH 2012) dan Diagram Timbangan NTP (Nilai Tukar Petani) 2012</i>	Tersedianya diagram timbangan (tahun dasar 2012) untuk penghitungan inflasi nasional dan Nilai Tukar Petani	Perluasan cakupan komoditas dan kota inflasi	Cakupan SBH: 66 kota, 774 komoditas Cakupan NTP: 32 Provinsi	Cakupan: 80 kota, 800 komoditas Cakupan NTP: 33 Provinsi
9	<u>Kegiatan :</u> Penyediaan dan Pengembangan Statistik Industri, Pertambangan dan Penggalian, Energi, dan Konstruksi <u>Fokus Kegiatan :</u> <i>Survei Industri Besar/Sedang</i>	Tersedianya indikator perkembangan industri nasional setiap bulan, triwulan dan tahunan	Timelag penyajian direktori dan publikasi data dan informasi statistik industri besar dan sedang, tahunan	Oktober (t-2) Tingkat Provinsi	Agustus (t-2) Tingkat Provinsi
10	<u>Kegiatan :</u> 1. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Ketahanan Sosial 2. Pengembangan Dan Analisis Statistik <u>Fokus Kegiatan :</u> <i>Penyusunan Informasi Statistik Kemiskinan</i>	Tersedianya data jumlah dan persentase penduduk miskin Nasional, Provinsi dan Kab/Kota setiap tahun	Statistik kemiskinan makro dan mikro yang meningkat kualitasnya	Perubahan tahun dasar	Tersedia inflasi masyarakat miskin

No	Kegiatan/Fokus Kegiatan	Output	Indikator Kinerja Utama	Target	
				2010	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11	<u>Kegiatan :</u> 1. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Ketahanan Sosial 2. Pengembangan Metodologi Sensus Dan Survei <u>Fokus Kegiatan :</u> Sensus Potensi Desa (Podes) 2013	Tersedianya basis data spasial potensi wilayah, dan statistik wilayah kecil	Penyajian statistik wilayah kecil (small area statistik)	Tingkat Kabupaten/ Kota	Tingkat Kecamatan

Tabel 2. Alokasi Anggaran 2010-2014 Menurut Program

(Juta Rupiah)

PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI				
	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A. ALOKASI PROGRAM TEKNIS	3.769.067	595.641	811.881	2.178.267	859.169
I. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PELAYANAN INFORMASI STATISTIK (P2IS)	3.769.067	595.641	811.881	2.178.267	859.169
- Sensus Penduduk 2010	3.300.000	25.000	15.187	-	-
- Survei Biaya Hidup 2012	-	9.358	104.815	23.997	12.442
- Survei Diagram Timbangan NTP 2012	-	15.000	122.785	33.703	13.258
- Sensus Pertanian 2013	-	6.979	119.684	641.947	238.606
- SUPAS 2015	-	-	-	-	10.000
- Sensus Ekonomi 2016	-	-	-	-	5.000
- Teknis Lainnya	469.067	570.641	796.694	178.267	859.169
B. ALOKASI PROGRAM GENERIK	1.279.981	1.076.733	1.145.932	1.178.375	1.211.898
I. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA BPS	915.132	819.618	887.140	987.863	1.019.624
- Statcap Cerdas (PHLN)	15.000	35.300	81.000	150.000	160.000
II. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR (PSPA) BPS	359.741	251.876	253.423	185.009	186.634
III. PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN AKUNTABILITAS APARATUR NEGARA (P2A2N) BPS	5.109	5.238	5.369	5.503	5.640
TOTAL	5.049.048	1.672.374	1.957.813	3.356.642	2.071.068

Catatan:

- *) Program Dukungan Manajemen belum termasuk rencana anggaran/dana remunerasi (2011-2014)
- **) Program Dukungan Manajemen termasuk Program Reformasi Birokrasi dengan Pinjaman Bank Dunia melalui Statcap CERDAS (Statistical Capacity Building-Change and Reform for Development of Statistics)

BAB IV

PENUTUP

Mengingat pentingnya peranan data dan informasi statistik dalam proses perencanaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan nasional maupun bagi masyarakat, maka BPS menentukan strategi-strategi perkuatan data dan informasi statistik sehingga menjadi sumber informasi pembangunan yang dapat dipercaya oleh semua pihak. Hal ini sejalan dengan RPJMN 2010-2014, yang menempatkan pembangunan data dan informasi statistik sebagai program pendukung manajemen pembangunan nasional.

Perkuatan data dan informasi statistik dilakukan dengan menata ulang kelembagaan dalam kerangka pencapaian *good governance* dan *clean government*. Reformasi birokrasi ditujukan untuk meningkat kualitas data, dengan membangun pilar-pilar pendukung yang meliputi pembangunan arsitektur dan peningkatan sarana dan prasarana pendukung TIK, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM. Komitmen ini dirumuskan sebagai antisipasi menghadapi tantangan global maupun regional pada periode lima tahun ke depan.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1:

Target Pembangunan untuk tahun 2010-2014 BADAN PUSAT STATISTIK

PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATOR	TARGET		UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Program: Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik	Meningkatnya penyediaan data dan informasi statistik yang lengkap, akurat, dan tepat waktu, serta meningkatnya pelayanan data dan informasi statistik yang efektif berbasis TIK	1. Meningkatnya kualitas hasil sensus dan survei di bidang statistik sosial, produksi, distribusi, jasa serta neraca nasional dan regional 2. Tersedianya indikator makro sosial dan ekonomi sebagai rujukan dalam menyusun dokumen perencanaan, pemantauan, maupun evaluasi pembangunan 3. Meningkatnya kualitas metodologi sensus dan survei 4. Meningkatnya kualitas pengolahan dan pelayanan data dan Informasi statistik	Sensus Penduduk berjalan dengan baik sesuai standar internasional	Hasil Sensus Pertanian 2013 dapat disajikan dengan kualitas prima	Deputi Bidang Teknis
1. Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei	Tersedianya metodologi sensus dan survei yang relevan dan mutakhir	1. Desain sampling untuk sensus dan survei bidang statistik sosial, bidang statistik produksi, dan bidang statistik distribusi dan jasa tersedia tepat waktu 2. Standar dan kualifikasi statistik sesuai dengan rujukan internasional	September tahun t-1	Juli tahun t-1	Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei
			Implementasi Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia sesuai dengan ISIC revisi 4	Implementasi Klasifikasi Jabatan Indonesia disesuaikan dengan Revisi 4	

PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATOR	TARGET		UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Pelayanan dan Pengembangan Diseminasi Informasi Statistik	Terciptanya pelayanan prima terhadap semua pengguna data dan informasi statistik secara seimbang	3. Frekuensi updating database kerangka sample sensus dan survei	Dua kali setahun	Empat kali setahun	Direktorat Diseminasi Statistik
		4. Frekuensi updating sketsa peta wilayah administrasi dan sketsa peta wilayah kerja statistik (blok sensus)	Dua kali setahun	Empat kali setahun	
		1. Persentase unit penyelenggara pelayanan publik yang sudah menerapkan Standar Pelayanan	25 %	100 %	
		2. Tersusunnya rencana peningkatan kualitas pelayanan publik pada unit penyelenggara pelayanan publik	25 %	100 %	
		3. Terlaksananya rencana peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai batas waktu yang ditetapkan	25 %	100 %	
		4. Pelayanan konsultasi data secara prima	75% layanan konsultasi	95% layanan konsultasi	
		5. Terbangunnya Sistem pelayanan statistik terpadu	30% kualitas layanan kepada pengguna data	50% kualitas layanan kepada pengguna data	
		6. Terbangunnya Sistem data warehouse terpadu	20% kepuasan pengguna data	50% kepuasan pengguna data	
		7. Tersedianya pengelolaan perpustakaan secara profesional	20% pengelolaan perpustakaan sesuai standarisasi	50% pengelolaan perpustakaan sesuai standarisasi	

PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATOR	TARGET		UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			30 sistem aplikasi	25 sistem aplikasi	Direktorat Sistem Informasi Statistik
3. Pengembangan Sistem Informasi Statistik	Tersedianya sarana dan prasarana teknologi informasi untuk menunjang kegiatan statistik dan manajerial	1. Tersedianya sistem aplikasi pengolahan untuk berbagai kegiatan statistik dan manajerial serta penyimpanan data yang dihasilkan 2. Tersedianya sarana dan prasarana jaringan komunikasi data 3. Tersedianya prasarana yang mendukung aplikasi pengolahan dan data repository 4. Tersedianya tenaga yang profesional di bidang teknologi informasi	30 sistem aplikasi 150 kantor BPS sudah mempunyai koneksi internet serta uptime layanan koneksi data 90% 80 % dari jumlah PC/Laptop terhadap jumlah pegawai 40 orang	Semua kantor BPS sudah mempunyai koneksi internet serta uptime layanan koneksi data 94% 100% untuk bidang teknis dan 75% untuk administrasi 200 orang	Direktorat Sistem Informasi Statistik
4. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kependudukan dan Ketenagaan	1. Tersedianya data dan informasi statistik sosial kependudukan dan ketenagakerjaan yang bermanfaat untuk analisis, perencanaan dan pengambilan keputusan	1.1. Tersedia indikator pengukuran dan kesempatan kerja 1.2. Tingkat upah pekerja 1.3. Tersedia Parameter demografi	Dua kali setahun Triwulanan Tingkat provinsi	Tiap triwulan Triwulanan Tingkat kabupaten/kota	Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagaan

PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATOR	TARGET		UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	2. Terselenggaranya kegiatan Sensus Penduduk 2010 dan tersedianya indikator yang mencakup parameter demografi dan indikator-indikator MDG's serta targeting beberapa kebijakan sosial	2.1. Tersedia data dan informasi statistik wilayah kecil di bidang kependudukan 2.2. Tersedia proyeksi penduduk 2010-2020 2.3. Tersedia indikator untuk perencanaan, evaluasi, dan analisis sosial ekonomi, seperti pendidikan, lansia, perumahan, kecacatan	Angka sementara: Agustus 2010 Angka final: Juli 2011 Selesai 2012 Selesai 2012	- - -	
5. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kesejahteraan Rakyat	Tersedia data dan informasi statistik kesejahteraan rakyat meliputi data dan informasi statistik rumahtangga, pendidikan, perumahan, dan kesehatan	1. Standar error (s.e) data hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) menurun 2. Menurunnya non sampling error Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)	Semua variabelable dan wilayah Jawa-Sumatera tidak melebihi 40 % Jadwal pelaksanaan tepat waktu	Semua variabel dan semua daerah tidak melebihi 40 % s.e Tidak ada penggantian sampel	Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat
6. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Ketahanan Sosial	Tersedianya basis data spasial potensi wilayah, statistik wilayah kecil dan modal sosial, lingkungan hidup, kerawanan sosial dan politik keamanan	1. Penyajian statistik wilayah kecil (small area statistik) 2. Tersedia Indeks demokrasi secara kontinyu 3. Tersedianya statistik lingkungan hidup secara kontinyu 4. Statistik kemiskinan makro dan mikro yang meningkat kualitasnya	Tingkat Kabupaten/Kota Nasional Nasional Perubahan tahun dasar	Tingkat Kecamatan Provinsi Provinsi Tersedia inflasi masyarakat miskin	Direktorat Statistik Ketahanan Sosial

PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATOR	TARGET		UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	1. Tersedianya data dan informasi statistik tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan yang berkesinambungan 2. Tersedianya data base statistik pertanian tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan hasil Sensus Pertanian 2013	1.1. Cakupan penyajian data dan informasi statistik tanaman pangan diperluas 1.2. Cakupan penyajian data dan informasi statistik hortikultura diperluas 1.3. Cakupan penyajian data dan informasi statistik perkebunan diperluas 2.1. Persiapan pada 2011 dan 2012 2.2. Pelaksanaan listing dan survei sub sektor pada 2013 2.3. Penyajian pada 2014 dan survei pendapatan petani pada 2014	Provinsi Provinsi Provinsi 2011: Pilot studi 2012: Gladi bersih	Kabupaten/kota Kabupaten/kota Kabupaten/kota Penyajian dan analisis hasil Sensus Pertanian 2013 dan survei pendapatan petani	Direktorat Statistik Tanaman pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
8. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan	1. Tersedianya data dan informasi statistik peternakan, perikanan, dan kehutanan yang meliputi karakteristik perusahaan, usaha rumah tangga, estimasi populasi dan produksi, serta kompilasi data sekunder	1.1. Waktu penyajian data dan informasi statistik peternakan, perikanan, dan kehutanan tahunan 1.2. Waktu penyajian data statistik peternakan, perikanan, dan kehutanan triwulanan	Waktu: Agustus (data tahun (t-2)) Per tahun (data tahun (t-1))	Waktu: Oktober (data tahun (t-1)) Per triwulan (data tahun (t))	Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan

PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATOR	TARGET		UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		1.3. Tingkat wilayah penyajian parameter estimasi produksi daging, usaha rumah tangga perikanan 1.4. Jumlah publikasi statistik peternakan, perikanan, dan kehutanan 2.1. Jumlah publikasi Sensus Pertanian 2013 di bidang peternakan, perikanan, dan kehutanan.	Jumlah: 9 jenis/judul -	Tingkat Provinsi Jumlah: 18 jenis/judul Jumlah: 3 jenis/judul, pada setiap tingkat pemerintahan: Nasional, provinsi dan kabupaten/kota	
9. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Industri, Pertambangan dan Penggalian, Energi, dan Konstruksi.	1. Tersedianya data dan informasi statistik industri besar dan sedang, industri kecil dan rumah tangga, pertambangan dan penggalian, energi dan konstruksi yang berkualitas	1.1. Timelag penyajian direktori dan publikasi data dan informasi statistik industri besar dan sedang, industri mikro dan kecil, pertambangan, penggalian, listrik, air bersih, gas kota dan Konstruksi tahunan	Oktober (t-2) Tingkat Provinsi	Agustus (t-2) Tingkat Provinsi	Direktorat Statistik Industri

PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATOR	TARGET		UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		1.2 Timelag penyajian publikasi data dan informasi statistik industri besar dan sedang bulanan,	November (t-1) Tingkat Nasional	September (t-1) Tingkat Nasional	
		1.3 Timelag penyajian publikasi data dan informasi statistik pertambangan dan energi triwulanan,	1 bulan setelah triwulan berjalan data triw t Tingkat Nasional	1 bulan setelah triwulan berjalan data triw t Tingkat Nasional	
		1.4 Timelag penyajian publikasi data dan informasi statistik konstruksi triwulanan	6 bulan setelah triwulan berjalan data triw t Tingkat Nasional	6 bulan setelah triwulan berjalan data triw t Tingkat Nasional	
		2.1 Pilot survei daftar listing Sensus Ekonomi 2016	-	Tersedianya kuesioner listing untuk Sensus Ekonomi 2016	
		2. Instrumen Sensus Ekonomi 2016			
10. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Distribusi	Tersedianya data Ekspor, Impor, Transportasi, dan Perdagangan Dalam Negeri yang berkualitas	1. Tersajinya data (angka sementara dan realisasi) ekspor terkini dengan dengan cakupan KPBC yang relevan	Timelag 1 bulan (angka sementara) dan 2 bulan (angka realisasi) Cakupan: 135 KPBC	Timelag 20 hari (angka sementara) dan 1,5 bulan (angka realisasi) Cakupan: 150 KPBC	Direktorat Statistik Distribusi

PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATOR	TARGET		UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Harga	1. Tersedianya data Harga di semua level, Indeks Harga Produsen, Indeks Harga Perdagangan Besar, Indeks Harga Konsumen, Inflasi/ deflasi dan Nilai Tukar Petani yang lengkap dan berkualitas	2. Tersajinya data perdagangan dalam negeri, pola distribusi komoditi pokok terkini dengan cakupan sampel yang relevan 3. Tersajinya data transportasi darat, udara, rel dan laut terkini dengan cakupan wilayah yang relevan 1.1. Tersajinya data harga dan indeks harga produsen terkini dengan cakupan sektor dan responden yang representatif/relevan 1.2. Tersajinya data harga dan indeks harga perdagangan besar, indeks kemahalan konstruksi terkini dengan cakupan sektor dan responden yang representatif/relevan 1.3. Tersajinya data harga, indeks harga konsumen, inflasi/deflasi, indikator perubahan harga di luar kota IHK terkini dengan cakupan kota yang representatif/relevan 1.4. Tersajinya data harga dan indeks harga pedesaan, Nilai Tukar Petani terkini dengan cakupan subsektor	Tingkat Penyajian: Nasional Cakupan: 15 Provinsi Tingkat Penyajian: Provinsi Cakupan: 33 Provinsi	Tingkat Penyajian: Provinsi Cakupan: 33 Provinsi Tingkat Penyajian: Provinsi Cakupan: 33 Provinsi	Direktorat Statistik Harga
			Timelag 2 bulan Cakupan: 2 sektor (pertanian, konstruksi)	Timelag 1 bulan Cakupan: 3 sektor (pertanian, konstruksi, industri)	
			Penyajian: Nasional Cakupan: HPB: 162 kab/kota IKK: 105 kab/kota	Penyajian: Nasional dan Propinsi Cakupan: HPB: 190 kab/kota IKK: 200 kab/kota	
			Cakupan: 66 kota, 774 komoditas	Cakupan: 80 kota, 800 komoditas	
			Timelag 1 bulan	Tidak ada Timelag	

PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATOR	TARGET		UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2014	
			(4)	(5)	
(1)	(2)	(3)			(6)
	2. Tersusunnya Diagram Timbang Indeks Harga Konsumen, Indeks Harga Perdagangan Besar, Indeks Harga Produsen, dan Nilai Tukar Petani yang berkualitas	dalam sektor pertanian dan responden yang representatif/relevan 2.1. Tersajinya data diagram timbang Indeks Harga Konsumen terkini per kota 2.2. Tersajinya data diagram timbang Indeks Harga Perdagangan Besar 2.3. Tersajinya data diagram timbang Indeks Harga Produsen 2.4. Tersajinya data diagram timbang Nilai Tukar Petani terkini per subsektor dalam sektor pertanian	Tahun dasar: 2007 Tahun Dasar 2005 Tahun Dasar 2005 Tahun dasar: 2007	Tahun dasar: 2012 Tahun Dasar 2010 Tahun Dasar 2010 Tahun dasar: 2012	
12. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Keuangan, Teknologi Informasi dan Pariwisata	Tersedianya data dan informasi statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata yang berkualitas	1. Tersajinya data Keuangan Daerah tingkat I, II dan III, BUMN dan BUMD, Kurs Valuta Asing, Perbankan dan Asuransi, pasar Modal terkini dan dengan cakupan yang relevan.	Tingkat Penyajian: Nasional Cakupan: Provinsi, Kab dan Desa	Tingkat Penyajian: Provinsi Cakupan: Provinsi, Kab dan Desa	Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi dan Pariwisata

PROGRAM/KEGIATAN (1)	OUTCOME/ OUTPUT (2)	INDIKATOR (3)	TARGET		UNIT ORGANISASI PELAKSANA (6)
			2010 (4)	2014 (5)	
		2. Tersajinya data Wisatawan Asing dan Domestik, Hotel dan Restoran, Biro dan Agen Perjalanan terkini dan dengan cakupan sampel yang relevan 3. Tersajinya data informasi teknologi, penggunaan teknologi informasi, indeks melek teknologi	Tingkat Penyajian: Provinsi Cakupan: Pintu masuk, Provinsi Tingkat Penyajian: Provinsi Cakupan: Provinsi	Tingkat Penyajian: Provinsi Cakupan: Pintu masuk, Provinsi Tingkat Penyajian: Provinsi Cakupan: Provinsi	
13. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Neraca Produksi	1. Tersedianya statistik PDB sektoral: triwulanan dan tahunan berdasarkan SNA 2008 serta perubahan tahun dasar PDB dan PDRB dari tahun 2000=100 menjadi 2010=100 2. Tersedianya statistik Tabel Input-Output Indonesia tahun 2010 3. Tersedianya statistik PDRB (propinsi dan kabupaten/ kota) triwulanan dan tahunan menurut sektor 4. Implementasi SNA 2008	1. Meningkatnya cakupan data PDB sektoral triwulanan dan tahunan. 2. Penurunan time lag penyajian statistik tabel Input-Output Indonesia tahun 2010. 3. Penurunan time lag penyajian PDRB (propinsi dan kabupaten/kota) menurut sektor 4. Meningkatnya pemahaman SNA 2008 serta aplikasi sistem/metodologi penyusunan neraca produksi	Tahun dasar 2000 24 bulan Agustus tahun t+1 (Provinsi) Oktober tahun (t+1): kab/kota Penguasaan materi SNA 2008	Tahun dasar 2010 mulai tahun 2011 22 bulan April tahun t+1 Mei tahun (t+1): Kabupaten/Kota Tersusnya neraca produksi sesuai SNA 2008	Direktorat Neraca Produksi

PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATOR	TARGET		UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5. Sistem Neraca Ekonomi Lingkungan Terpadu (Sisnerling)		5. Meningkatnya cakupan komoditi serta pengembangan metodologi pada penyusunan Sisnerling	Tersusunnya Neraca ekonomis	Tersusun Neraca ekologis	
14. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Neraca Pengeluaran	1. Tersedianya statistik PDB Pengeluaran triwulanan dan tahunan 2. Tersedianya statistik Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE) 3. Tersedianya statistik Neraca Arus Dana (NAD) triwulanan dan tahunan yang lebih berkualitas 4. Tersedianya statistik PDRB (propinsi dan kabupaten/kota) Pengeluaran triwulanan dan tahunan yang lebih berkualitas.	1. Meningkatnya akurasi data PDB pengeluaran triwulanan dan tahunan. 2. Penurunan time lag penyajian statistik SNSE 3. Penurunan time lag penyajian serta meningkatnya relevansi statistik NAD triwulanan dan tahunan 4. Penurunan time lag penyajian data PDRB (propinsi dan kabupaten/kota) menurut pengeluaran triwulanan dan tahunan. 5. Penurunan deskrepansi PDRB dengan PDB	Diskrepansi terhadap PDB sektoral < 5 persen Lag 3 tahun - Lag 3 triwulan - Klasifikasi instru-men finansial menggunakan LBU 2002 - Waktu: 12 bulan (data tahun (t-1)) Tingkat: nasional - Waktu: Agustus (data tahun (t-1)) Tingkat: propinsi - Waktu: Oktober (data tahun (t-1)) Tingkat: kab/kota Diskrepansi PDB dengan PDRB prop kurang dari 15 persen (ADHB) dan kurang dari 6 persen (ADHK)	Diskrepansi terhadap PDB sektoral < 2 persen Lag 2 tahun - Lag 1 triwulan - Klasifikasi instru-men finansial menggunakan konsep MFSM - Waktu: 10 bulan (data tahun (t-1)) Tingkat: nasional - Waktu: April (data tahun (t-1)) Tingkat: propinsi - Waktu: Mei (data tahun (t-1)) Tingkat: kab/kota Diskrepansi PDB dengan PDRB ku-rang dari 10 persen (ADHB) dan kurang dari 4 persen	Direktorat Neraca Pengeluaran

PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATOR	TARGET		UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	5. Implementasi SNA 2008	6. Meningkatnya pemahaman SNA 2008 serta aplikasi sistem/metodologi penyusunan neraca penerimaan (income accounts), neraca capital, neraca financial dan neraca institusi (bertahap)	Penguasaan materi SNA 2008	Tersusnya neraca penerimaan, neraca kapital, neraca finansial dan neraca institusi (bertahap)	
15. Penyediaan dan Pengembangan Analisis Statistik	1. Tersedianya data analisis statistik sosial, ekonomi dan lintas sektor yang lebih berkualitas	1. Menurunnya time lag penyajian analisis statistik sosial, ekonomi dan lintas sektor	Waktu terbit : Desember	Waktu terbit : November	Direktoral Analisis dan Pengembangan
	2. Tersedianya Indeks Tendensi Bisnis dan Indeks Tendensi Konsumen	2. Meningkatnya cakupan wilayah	Skala nasional	Skala nasional dan 33 propinsi	
	3. Tersedianya data IPM dan kajian profil komoditas unggulan yang lebih berkualitas	3. Menurunnya time lag penyajian dan meningkatnya cakupan wilayah penyajian serta jenis kajian	- Desember - skala nasional - 1 jenis kajian	- Agustus (IPM), Nopember (kajian komoditas unggulan) - Skala nasional, propinsi, dan kabupaten/kota - 8 jenis kajian	
	4. Tersedianya indikator statistik sosial-ekonomi dan lintas sektor	4. Menurunnya time lag penyajian indikator kesra dan laporan sosial, laporan ekonomi Indonesia tahunan, statistik Indonesia tahunan	- Waktu terbit indikator kesra dan laporan sosial: Juli, September (data tahun (t-1)) - Waktu terbit laporan	- Waktu terbit indikator kesra dan laporan sosial: Juni, Agustus (data tahun (t-1))	

PROGRAM/KEGIATAN (1)	OUTCOME/ OUTPUT (2)	INDIKATOR (3)	TARGET		UNIT ORGANISASI PELAKSANA (6)
			2010 (4)	2014 (5)	
		dan indikator pembangunan regional	ekonomi Indonesia tahunan: Mei (data tahun (t-1)) - Waktu terbit statistik Indonesia tahunan: September (data tahun (t-1)), beberapa data tahun (t) - Waktu terbit Indikator pembangunan regional Desember (data tahun (t-1))	- Waktu terbit laporan ekonomi Indonesia tahunan: April (data tahun (t-1)) - Waktu terbit statistik Indonesia tahunan: Agustus (data tahun (t-1)), beberapa data tahun (t) - Waktu terbit indikator pembangunan regional: Oktober	
5. Tersedianya Model Statistik Ekonomi dan Sosial		5. Meningkatnya jenis model Statistik Ekonomi, sosial dalam kerangka Nasional dan Regional	- Jumlah: 3 jenis model ekonomi dan 3 jenis model sosial - Tingkat penyajian: nasional dan Propinsi	- (data tahun (t-1)) - Jumlah: 8 jenis model ekonomi dan 8 jenis model sosial (kumulatif 2011-2014) - Tingkat penyajian: nasional dan Propinsi	

PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATOR	TARGET		UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2014	
			(4)	(5)	
2. Pengelolaan dan Pengembangan Administrasi Keuangan	(2) Meningkatnya kualitas akuntabilitas pengelolaan anggaran	(3) 1. Manajemen kearsipan dan dokumentasi sudah dilaksanakan dengan sistem berbasis TIK 2. Terselenggaranya SAK Satker yang sesuai aturan Menteri Keuangan 3. Persentase bendahara yang mempunyai sertifikat keahlian akuntansi pemerintah	80 % 80 % 60 %	100 % 100 % 100 %	Biro Keuangan (6)
3. Pengelolaan dan Pengembangan Administrasi Kepegawaian	1. Penerapan peraturan mengenai disiplin PNS 2. Penerapan pakta integritas bagi pejabat eselon I, II, dan III	1. Tersedianya sistem penilaian kinerja yang terukur 2. Tersedianya sistem pengendalian disiplin yang terukur 3. Persentase pejabat Eselon I, II, dan III yang menandatangani dan melaksanakan pakta integritas 4. Persentase pegawai yang memangku jabatan fungsional tertentu dan memperoleh angka kredit sesuai ketentuan serta mem-peroleh sertifikat kenaikan jenjang jabatan/pangkat dibandingkan jumlah pegawai	80 % 80 % 0 % 10 %	100 % 100 % 100 % 25 %	Biro Kepegawaian

PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATOR	TARGET		UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4. Pelayanan Publik, Hubungan Masyarakat dan Hukum	1. Publisitas kegiatan dan hasil kinerja BPS yang tepat waktu 2. Review UU No 16/1997 tentang Statistik sebelum 2012 3. Peraturan perundangan pelaksana UU Statistik di-tuntaskan sebelum 2014	1. Press release dipercepat 2. Revisi UU No 16/1997 pada 2010, beserta peraturan perundangan pelaksanaanya sebelum 2012 3. Persentase tersusunnya struktur kelembagaan yang proporsional, efektif, dan efisien	Press release data triwulanan dipercepat 15 hari Revisi UU Statistik diund-angkan Presiden pada 2011 80 %	Press release data triwulanan dipercepat 10 hari Perpres dan Perka tentang Reorgani-sasi BPS diselesaikan sebelum 2014 100 %	Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum
5 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Negara	1. Terselenggaranya Diklat Kepemimpinan 2. Terselenggaranya Diklat Teknis Statistik dan Komputasi tingkat ahli 3. Terselenggaranya Diklat Fungsional Statistisi dan Pranata Komputer	1. Banyaknya pejabat struktural yang menyelesaikan diklat kepemimpinan 2. Tersedianya sistem Diklat berbasis merit dan kompetensi 3. Persentase pejabat fungsional bersertifikat keahlian sesuai jenjang kepangkatan	10 % 1 % Eselon IV 50 %	30 % 10 % 100 %	Pusat Pendidikan dan Pelatihan
6 Pelayanan internal Perkantoran dan Kepegawaian	Terlaksananya reformasi birokrasi sampai ke BPS Kabupaten/Kota	Reformasi birokrasi di BPS RI	25 %	100 %	Sekretaris Korpri
7. Penyelenggaraan Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS)	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan SDM D IV STIS yang kompeten dan siap pakai, baik bagi BPS maupun Luar BPS	1. Jumlah lulusan mahasiswa STIS yang siap pakai per tahun 2. Persentase kelulusan STIS 3. Ratio mahasiswa/dosen 4. Meningkatkan ratio mahasiswa Tugas Belajar dari luar BPS	290 95 % 1350/40 66/1350	500 100 % 2000/80 100/2000	Sekolah Tinggi Ilmu Statistik

PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATOR	TARGET		UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2014	
			(4)	(5)	
(1) PROGRAM: Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (PSPA) BPS	(2) Terpenuhinya sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan kinerja kegiatan teknis	(3) 1. Persentase gedung negara (kantor dan rumah dinas) yang rusak berat 2. Terpenuhinya sarana penunjang dan terpelihara dengan baik	10 % dan 15 % 50 %	0 % 100 %	(6) Sekretaris Utama
1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara BPS serta Operasional Perkantoran Lainnya	1. Terciptanya lingkungan kerja yang kondusif dan rumah jabatan yang memadai	1. Renovasi dan pembangunan gedung kantor dan rumah negara terlaksana dengan baik 2. Perlengkapan sarana dan prasarana terpenuhi 3. Terpelihara dan tersedianya kendaraan operasional roda 2 dan roda 4	1. 70% GK & RN selesai direnovasi & dibangun 2. Genset kab/kota 484 3. 7330 kendaraan roda 2 dan 934 kendaraan roda 4	1. 90% GK & RN selesai direnovasi & dibangun 2. Genset kab/kota 526 3. 7823 kendaraan roda 2 dan 1000 kendaraan roda 4	Biro Umum
PROGRAM: Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Negara (P2A2N) BPS	Meningkatnya kualitas akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan dan barang menuju tertib administrasi dan opini WTP terhadap Laporan Keuangan	1. Meningkatkan kualitas akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan dan barang menuju tertib administrasi dan opini WTP terhadap Laporan Keuangan 2. Persentase temuan BPK yang ditindaklanjuti	90 % 90 %	100 % 100 %	Inspektur Utama
1. Pengawasan Dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BPS	1. Pengawasan Kinerja dan Akuntabilitas BPS	1. Opini BPK atas LK BPS 2. Persentase penyimpangan terhadap total anggaran 3. Persentase pejabat yang telah melaporkan LHKPN 4. Persentase tingkat pencapaian kinerja utama	WDP 10 % 50 % 90 %	WTP 2 % 100 % 98 %	Inspektorat Wilayah I, Wilayah II ,dan Wilayah III

Lampiran 2

Kebutuhan Pendanaan Pembangunan Tahun 2010-2014 BADAN PUSAT STATISTIK

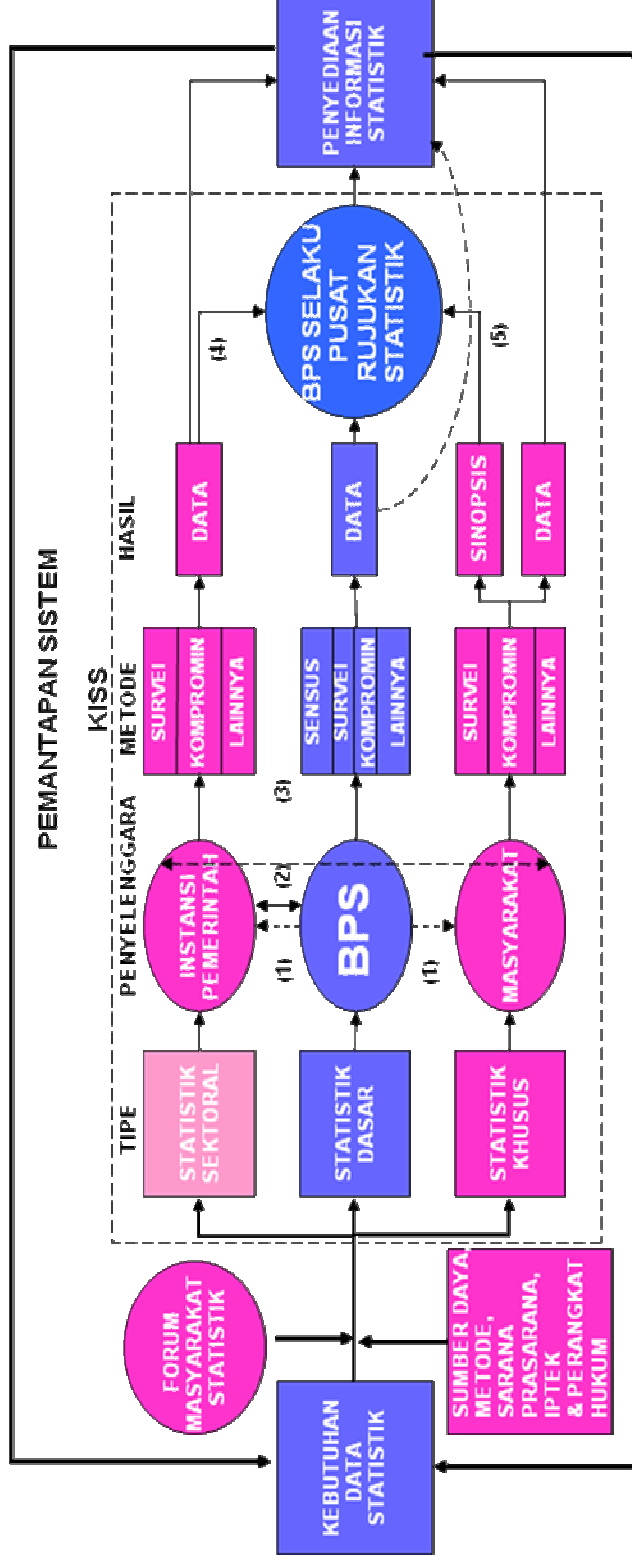
(000 Rp)

PROGRAM/KEGIATAN		ALOKASI				
		2010 (2)	2011 (3)	2012 (4)	2013 (5)	2014 (6)
(1)						
A. PROGRAM TEKNIS						
I. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PELAYANAN INFORMASI STATISTIK (P2IS)						
1	Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei	3.769.066.829	595.640.948	811.881.491	2.178.266.923	859.169.416
2	Pelayanan dan Pengembangan Diseminasi Informasi Statistik	3.769.066.829	595.640.948	811.881.491	2.178.266.923	859.169.416
3	Pengembangan Sistem Informasi Statistik	752.522	6.057.190	7.834.613	27.040.033	7.113.858
4	Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan	9.267.980	5.495.062	6.044.568	6.649.025	7.313.928
	- Sensus Penduduk 2010	5.704.004	6.925.636	7.062.917	7.511.631	7.452.938
	- Survei Penduduk Antar Sensus	3.356.231.465	85.742.408	77.611.322	64.173.437	75.948.619
		3.300.000.000	25.000.000	15.187.128	-	-
		-	-	-	-	10.000.000
5	Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kesejahteraan Rakyat	149.072.206	151.562.390	154.889.726	158.631.268	162.135.870
6	Penyediaan dan Pengembangan Statistik Ketahanan Sosial	3.382.184	111.339.082	7.330.712	8.176.397	119.594.238
7	Penyediaan dan Pengembangan Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	84.864.720	43.800.336	141.524.315	290.250.411	245.479.718
	- Sensus Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	-	3.288.809	100.000.000	247.687.988	201.853.234
8	Penyediaan dan Pengembangan Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan	11.858.248	14.938.154	31.213.336	406.076.569	48.866.008
	- Sensus Pertanian Peternakan, Perikanan dan Kehutanan	-	3.690.022	19.684.000	394.259.000	36.753.000
9	Penyediaan dan Pengembangan Statistik Industri, Pertambangan dan Penggalian, Energi, dan Konstruksi.	29.213.359	25.431.717	26.322.033	27.260.060	28.249.535

PROGRAM/KEGIATAN		ALOKASI				
		2010	2011	2012	2013	2014
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10	Penyediaan dan Pengembangan Statistik Distribusi	8.716.211	9.068.020	9.284.901	9.507.007	12.650.337
	- Sensus Ekonomi 2016	-	-	-	-	5.000.000
11	Penyediaan dan Pengembangan Statistik Harga	27.354.863	52.608.618	256.698.927	87.675.748	56.581.958
	- Survei Biaya Hidup 2012	-	9.358.189	104.814.655	23.996.673	12.441.750
	- Diagram Timbangan Nilai Tukar Petani 2012	-	15.000.000	122.785.345	33.703.327	13.258.250
12	Penyediaan dan Pengembangan Statistik Keuangan, Teknologi Informasi dan Pariwisata	57.311.038	16.371.295	17.857.966	18.876.052	20.001.142
13	Penyediaan dan Pengembangan Statistik Neraca Produksi	14.756.025	26.065.642	27.525.233	24.738.978	25.608.051
14	Penyediaan dan Pengembangan Statistik Neraca Pengeluaran	7.279.685	17.968.067	18.266.044	18.571.470	18.884.532
15	Pengembangan dan Analisis Statistik	3.302.319	22.267.333	22.414.879	23.128.837	23.288.685
B.	PROGRAM GENERIK	1.279.981.391	1.076.732.582	1.145.931.800	1.178.374.592	1.211.898.247
I.	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIK BPS LAINNYA	915.131.874	819.618.468	887.139.832	987.862.826	1.019.623.686
1	Penyusunan, Pengembangan dan Evaluasi Program Kegiatan dan Anggaran	27.126.130	23.247.971	23.500.930	24.455.175	25.854.280
2	Pengelolaan dan Pengembangan Administrasi Keuangan	83.522.165	86.078.707	86.300.523	87.600.448	90.568.712
3	Pengelolaan dan Pengembangan Administrasi Kepegawaian	3.858.314	6.988.820	6.881.299	8.100.076	8.764.511
4	Pelayanan Publik, Hubungan Masyarakat, dan Hukum	3.197.680	3.393.151	3.500.149	3.825.267	3.554.047
5	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Negara	14.155.495	15.851.420	16.286.355	16.788.730	17.297.545
6	Pelayanan Internal Perkantoran dan Kepegawaian	18.826.529	43.557.900	98.517.690	181.449.459	193.594.405
7	Penyelenggaraan Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS)	13.178.700	13.126.592	13.587.339	14.009.956	14.553.508
8	Operasional Perkantoran lainnya (Kegiatan Lintas Biro)	31.755.643	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
9	Biro Umum (di luar PSPA Pusat)	1.779.770	1.824.264	1.869.871	1.916.618	1.964.533

PROGRAM/KEGIATAN		ALOKASI				
		2010	2011	2012	2013	2014
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS Provinsi	229.508.754	135.418.258	137.327.913	140.739.222	144.253.188
11	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS Kabupaten/Kota	488.222.694	470.131.385	479.367.764	488.977.876	499.218.957
II.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR (PSPA) BPS	359.740.885	251.876.365	253.423.274	185.008.856	186.634.077
1	Pengadaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara BPS Pusat	162.526.241	82.847.847	83.169.043	33.498.269	33.835.726
2	Pengadaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara BPS Provinsi dan BPS Kab/Kota	197.214.644	169.028.518	170.254.230	151.510.586	152.798.351
III.	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN AKUNTABILITAS APARATUR NEGARA BPS (P2A2N)	5.108.632	5.237.750	5.368.694	5.502.911	5.640.484
1	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Inspektorat I	1.702.877	1.745.917	1.789.565	1.834.304	1.880.161
2	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Inspektorat II	1.702.877	1.745.917	1.789.565	1.834.304	1.880.161
3	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Inspektorat III	1.702.877	1.745.917	1.789.565	1.834.304	1.880.161
	TOTAL	5.049.048.220	1.672.373.530	1.957.813.291	3.356.641.515	2.071.067.663

SISTEM STATISTIK NASIONAL



Umpan Balik

KETERANGAN

KISS : Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi, dan Standarisasi.

KOMPROMIN: Kompilasi Produk Administrasi.

- (1): BPS mengkoordinasikan Penyelenggaraan Statistik
- (2): Instansi Pemerintah memberitahukan rancangan survei dan BPS memberikan Rekomendasi
- (3): Instansi Pemerintah dan masyarakat saling berkoordinasi dan kerjasama
- (4): Instansi Pemerintah menyerahkan hasil ke Pusat Rujukan Statistik
- (5): Masyarakat menyerahkan Sinopsis ke Pusat Rujukan Statistik

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



BADAN PUSAT STATISTIK

Jl. dr. Sutomo No. 6-8 Jakarta 10710

Telp. : (021) 3841195, 3842508, 3810291-4, Fax. : (021) 3857046

Homepage : <http://www.bps.go.id> E-mail : bpshq@bps.go.id

